



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PARTISIPASI PETANI DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI LIMAU MANIS KOTA PADANG SUMATERA BARAT

SKRIPSI

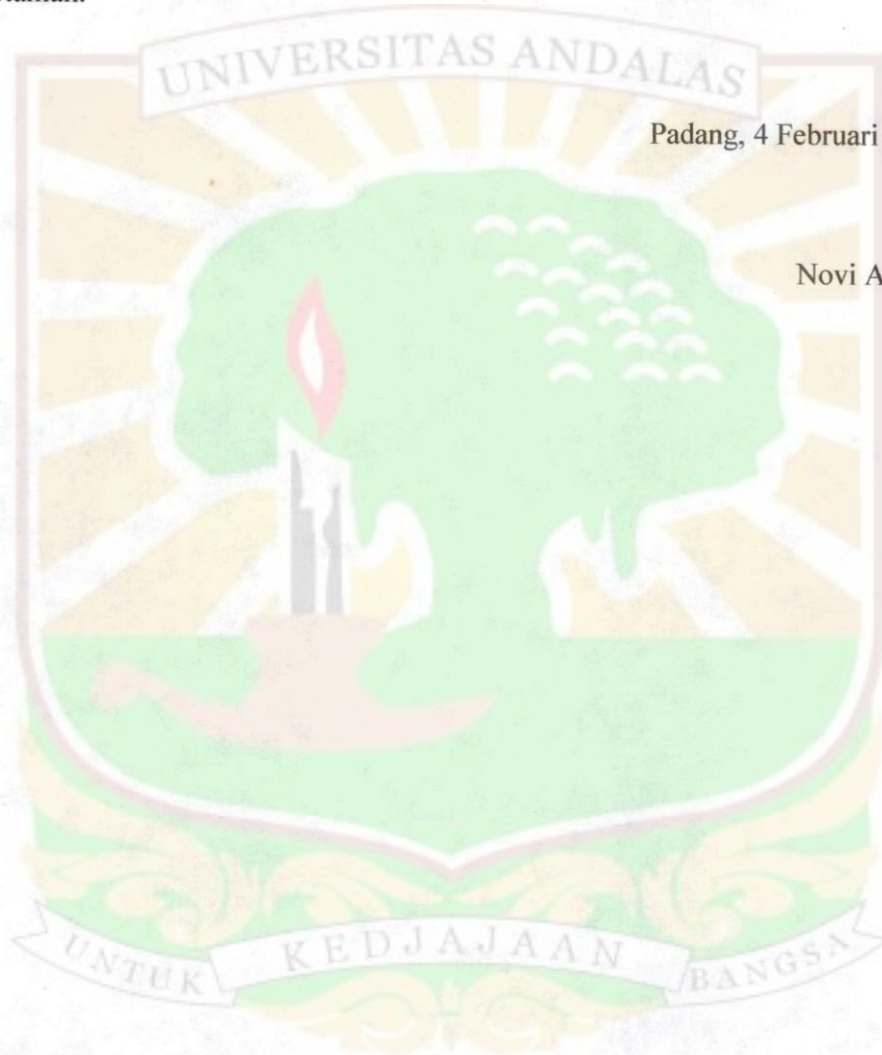


**NOVI AFRIANTI
07115020**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

BIODATA

Penulis dilahirkan di Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 Oktober 1988 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Erwin dan Mariana. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 05 Sialang Gaung (1995-2001). Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri 03 Dharmasraya (2001-2004). Sekolah Menengah Kejuruan ditempuh di SMK Negeri 01 Koto Baru, (2004-2007). Pada tahun 2007 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian.



Padang, 4 Februari 2011

Novi Afrianti

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugerah dalam berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat”. Dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Ekonomi Pengairan pada Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas Andalas Padang.

Ucapan terimakasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Ir.Endry Martius, MSc dan Bapak Ferdhinal Asful, SP.MSi selaku dosen pembimbing yang telah memberi petunjuk dan saran serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada dosen penguji seminar proposal dan seminar hasil penelitian serta panitia ujian kompre atas segala kritik dan sarannya sehingga memberikan inspirasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, seluruh dosen atas ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis, karyawan Fakultas Pertanian yang telah memberikan bantuan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Rasa kasih sayang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Ayahanda Erwin dan Ibunda Mariana atas doa dan semangat untuk kesuksesan ini, rasa terima kasih juga tak lupa kepada pihak yang banyak membantu dalam memberikan informasi serta kelengkapan data penelitian selama di lapangan, dan seluruh responden penelitian terimakasih atas partisipasinya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kelemahan, dan oleh sebab itu penulis juga mengharapkan masukan dari segenap pembaca guna penyempurnaan dimasa datang. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dengan penelitian ini untuk pengembangan ilmu Sosial Ekonomi Pertanian pada umumnya.

Padang, Februari 2011

N.A

DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Partisipasi.....	4
2.2 Pengelolaan Irigasi.....	5
2.2.1 Operasi.....	7
2.2.2 Pemeliharaan.....	7
2.2.3 Rehabilitasi	8
2.2.4 Pengerahan Sumber Daya.....	9
2.2.5 Penanganan Konflik.....	10
2.3 Konsepsi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.....	11
2.4 Partisipasi P3Adalam Pengelolaan irigasi.....	13
2.5 Motivasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi.....	15
2.6 Penelitian Terdahulu.....	15
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
3.2 Metode Penelitian dan Pengambilan Sampel.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4 Topik Data.....	21
3.5 Analisa Data.....	22
3.6 Kerangka Pemikiran.....	24

3.7 Defenisi Operasional.....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil.....	30
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Irigasi Limau Manis.....	30
4.1.2 Identitas Responden.....	34
4.1.3 Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis.....	37
4.1.4 Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi.....	44
4.1.5 Motivasi Petani Berpartisipasi dalam Pengelolaan Irigasi.....	49
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Tingkat Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis.....	50
4.2.2 Motivasi dalam Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis	54
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Halaman</u>
2.1 Matrik Penelitian Terdahulu.....	18
3.1 Topik data Penelitian.....	21
3.2 Kriteria Penilaian Partisipasi.....	22
3.3 Matrik Data Set.....	28
4.1 Karakteristik Informan Kunci.....	34
4.2 Karakteristik Petani Sampel.....	35
4.3 Partisipasi Petani dalam Operasi Jaringan Irigasi	44
4.4 Partisipasi Petani dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi	45
4.5 Partisipasi Petani dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi	46
4.6 Partisipasi Petani dalam Pengaliran Sumber Daya.....	47
4.7 Partisipasi Petani dalam Penanganan Konflik.....	48
4.8 Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi.....	49
4.9 Pengaruh Faktor Internal terhadap Partisipasi Petani.....	49
4.10 Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Partisipasi Petani.....	50



DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Halaman</u>
2.1 Bagan Tahapan Proses Partisipasi.....	4
3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
4.1 Pola Tanam Daerah Irigasi Limau Manis.....	33



ANALISIS PARTISIPASI PETANI DALAM PENGELOLAAN IRIGASI DI DAERAH IRIGASI LIMAU MANIS KOTA PADANG SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Irigasi Limau Manis Kota Padang Sumatera Barat, selama dua bulan, mulai Bulan Oktober sampai November 2010. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus (*case study*). Penentuan petani sampel secara acak sederhana dipilih dari anggota dua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yaitu P3A yang terletak di hulu dan P3A yang terletak di hilir berjumlah 76 orang responden (15% dari populasi sampel). Teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil penilaian kuesioner kepada responden dan data sekunder diperoleh dari dinas/instansi terkait. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif yang dianalisis kedalam kategori partisipasi menurut Slamet 1993.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis masih berada pada kategori sedang, dengan kategori rendah untuk petani yang berada di hulu dan kategori sedang untuk petani yang berada di hilir. Masih rendahnya partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Diantara kedua faktor tersebut yang paling mempengaruhi secara signifikan yaitu faktor eksternal yang meliputi luas lahan, jarak antara saluran dan lahan serta letak lahan dalam Daerah Irigasi. Untuk itu, perlu kesadaran petani untuk berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi sehingga manfaat irigasi bisa dirasakan secara maksimal dan diharapkan agar semua motivasi petani dapat meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi.

Kata kunci : Partisipasi Petani, Pengelolaan Irigasi, Motivasi



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat (Partowijoto 2004).

Irigasi sendiri sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dan tentu saja dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi dari masyarakat. Membangun irigasi pada era otonomi daerah ini mesti punya visi dan sustainable dimana partisipasi masyarakat menjadi prinsip dasarnya. Irigasi sendiri dikelola dan menjadi kewenangan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dalam membangun dan meningkatkan potensinya. Meski PU diberi kewenangan, di era reformasi ini tentu saja harus ada partisipasi masyarakat. Kementrian PU telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Diantaranya adalah Permen PU No. 30 tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Permen ini menjadi landasan pentingnya partisipasi masyarakat terutama masyarakat tani (Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang, 2009).

Daerah Irigasi Limau Manis secara administratif termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan dengan luas Daerah Irigasi 555 Ha. Sumber air Daerah irigasi Limau Manis berasal dari Sungai Batang Limau Manis. Daerah irigasi Limau Manis mengalir areal sawah dari hulu hingga hilir yang meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yakni Kelurahan Limau Manis, Kelurahan Kapalo Koto, Kelurahan Piai Tengah, Kelurahan Cupak Tengah, Kelurahan Koto Tuo. Kelima kelurahan ini terletak di Kecamatan Pauh. Dua kelurahan lagi yaitu Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Koto Lalang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan. Agar manfaat irigasi dapat dirasakan secara maksimal, maka di butuhkanlah pengelolaan yang maksimal pula dengan menggunakan pendekatan pengelolaan partisipatif oleh masyarakat (Profil Derah Irigasi Limau Manis, 2009)

Pada dasarnya, pendekatan pengelolaan irigasi partisipatif adalah suatu pendekatan strategis dalam pengelolaan infrastruktur irigasi melalui keikutsertaan petani dalam semua aspek penyelenggaraan irigasi, termasuk perencanaan, desain, pelaksanaan, pengembangan (pembangunan/rehabilitasi), pembiayaan, pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (O&P), pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta penyempurnaan sistem dari waktu ke waktu secara berkelanjutan (PP RI Nomor 20 tahun 2006).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam PP RI No 20 tahun 2006 telah jelas bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang duwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi yang partisipatif. Namun berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di Daerah Irigasi Limau Manis diketahui bahwa belum semua petani berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dirasa perlu adanya suatu penelitian yang mengkaji tentang partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, yang nantinya akan diketahui hasil akhirnya berupa tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi. Karena penelitian ini mengukur tingkat partisipasi diharapkan dari hasil penelitian ini juga akan muncul penyebab belum ikut sertanya petani dalam pengelolaan irigasi, sehingga dapat disusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan analisis partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis yaitu:

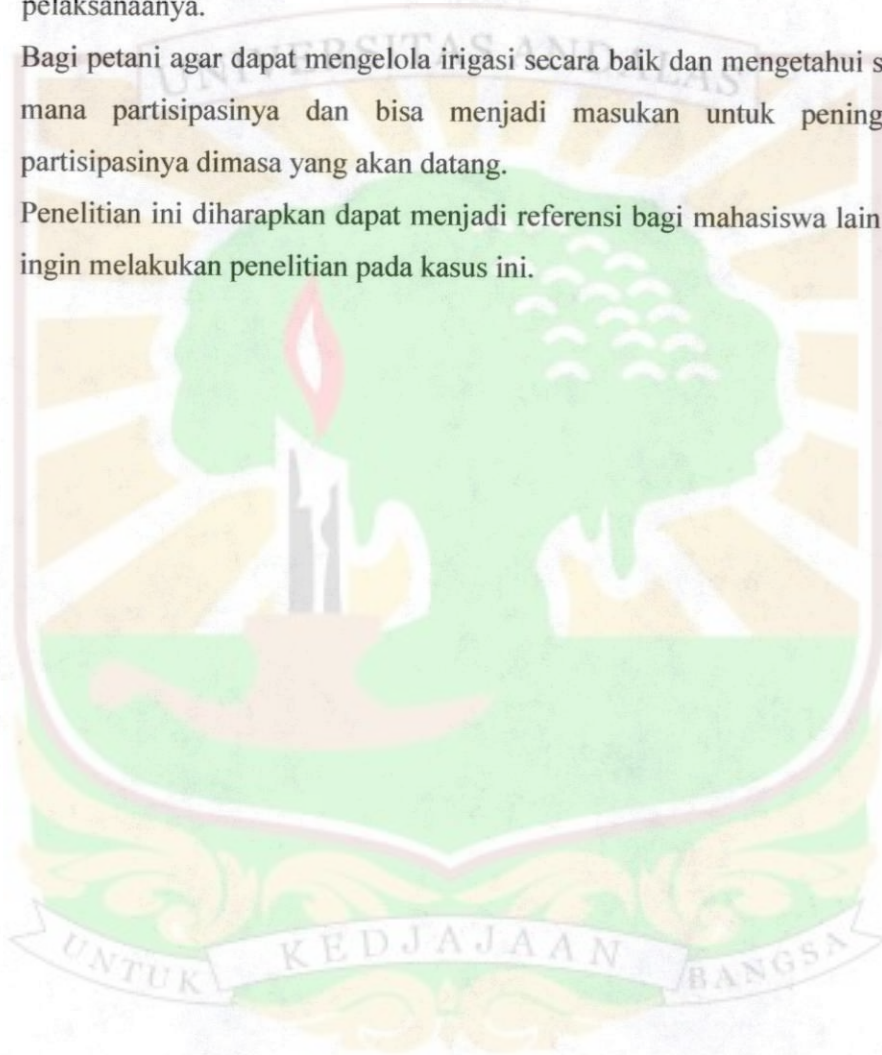
1. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi?
2. Apa motivasi petani berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengukur tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi.
2. Mengetahui motivasi petani berpartisipasi dalam pengelolaan irigasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi tolak ukur terhadap suatu program partisipatif yang melibatkan masyarakat (petani) dalam pelaksanaannya.
2. Bagi petani agar dapat mengelola irigasi secara baik dan mengetahui sejauh mana partisipasinya dan bisa menjadi masukan untuk peningkatan partisipasinya dimasa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian pada kasus ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

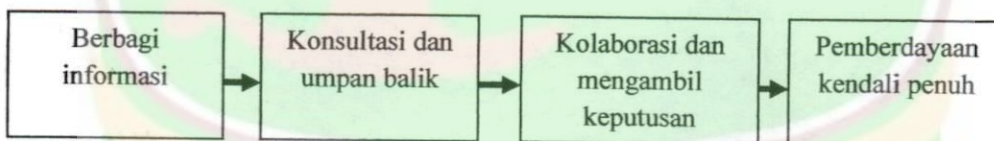
2.1 Partisipasi

Partisipasi dibatasi dimana pihak yang mempunyai kehendak, mengambil prakarsa atau bermaksud untuk melaksanakan sesuatu baik yang datang dari pemerintah maupun publik (masyarakat, lembaga, kalangan swasta) mulai dari tahap awal (*inisiating*), perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*implementation*) sampai tahap keberlanjutan (*sustaining*) (Partowijoto, 2004).

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis (Junanto, 2002)

Partisipasi dapat diartikan sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam pengambilan keputusan. Namun, bila dicermati dengan baik, maka pengertian tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam mengambil keputusan tetapi meliputi pengertian yang lebih luas, meliputi proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan (Henuk, 2008).

Tahapan proses partisipasi dalam pembangunan menurut Partowijoto (2004) dimulai dari tahap awal yaitu tahap pasif (berbagi informasi) sampai pada tahap akhir yaitu tahap aktif (berbagi kendali) seperti diuraikan pada bagan berikut :



Gambar 2.1. Bagan Tahapan Proses Partisipasi

Pada tahap pasif dari spektrum proses partisipasi, kegiatan pembangunan yang berlangsung adalah penyebaran informasi dari para *stakeholders*, dimana penyebaran informasi merupakan bagian dari tahap inisiasi dari proses partisipasi mengenai latar belakang atau kondisi sosial masyarakat setempat. Tahap selanjutnya adalah kolaborasi sampai pada pengambilan keputusan bersama, yang merupakan tahap partisipasi original (*genuine*) yang berkelanjutan (*sustained*).

Kedalaman proses partisipasi dimulai dari dangkal (*shallow*) sampai dalam (*deep*) atau dari pertukaran informasi secara pasif (*passive exchange of*

information) sampai keterlibatan penuh (*full engagement*). Pada tingkat kedalaman tertinggi, yaitu pada kondisi pemberdayaan dan kendali penuh, kewenangan dalam pengambilan keputusan terpusat pada komunitas setempat. Komunitas setempat menyusun rencana dan mengelola kegiatan berdasarkan gagasan dan prioritas yang telah ditetapkan. Para profesional dan penyandang dana bertindak sebagai katalisator dan mendukung, bukan mengarahkan dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan (Partowijoto, 2004).

2.2 Pengelolaan Irigasi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi, selain itu Pasandaran (1998) dalam Hidayat (2003) menambahkan bahwa tugas yang dilakukan dalam pengelolaan irigasi meliputi Pengerahan sumber daya dan penanganan konflik yang terjadi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/prt/m/2007 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan sesuai kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan pembiayaan masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A.

Jangkauan pengairan dengan jaringan-jaringannya sangat luas sehingga dalam pembangunan sarana-sarana dan pemeliharaannya memerlukan keterpaduan kegiatan antara pihak pemerintah dengan pihak masyarakat. Dalam keterpaduan ini pihak pemerintah membangun jaringan-jaringan pengairan utama, yang meliputi pembangunan bendungan, bangunan penguras, bangunan

pembagi, saluran-saluran primer dan sekunder termasuk eksploitasi dan pemeliharanya, sehingga selanjutnya kita mengenal sebutan irigasi (pengairan) Negara. Pembangunan saluran-saluran tersier eksploitasi dan pemeliharannya diserahkan pada masyarakat terutama para pemakai air pengairan sehingga selanjutnya kita mengenal sebutan irigasi masyarakat. Pada irigasi masyarakat (lazim disebut pula irigasi sederhana atau irigasi pedesaan) karena adanya pembinaan-pembinaan dari pihak pemerintah maka dapat dibangun secara gotong royong bangunan irigasi, seperti bendungan, saluran-saluran pengairan untuk mengairi petakan-petakan persawahan/pertanamannya secara lebih langsung, yang pengelolanya (eksploitasi dan pemeliharaan) menjadi tanggung jawab masyarakat dengan menerapkan sistem musyawarah dan kegotong royongan (Kartasapoetra, 1990).

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air oleh Dinas atau Instansi Kabupaten/Kota atau Provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi Instansi Pemerintah, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Komisi Irigasi (PP RI no 20 tahun 2006).

2.2.1 Operasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2006, Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, menyusun rencana tata tanam, dan menyusun rencana pembagian air. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah, pemerintah provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan penting dan strategis dalam upaya mempertahankan keberlanjutan sistem jaringan irigasi. Dengan demikian apabila kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan tidak dilakukan, maka secara berangsur-angsur jaringan irigasi tersebut mengalami penurunan fungsinya dengan cepat (Muchlis *dalam* Hidayat 2003).

2.2.2 Pemeliharaan

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 32 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Sedangkan pengamanan jaringan irigasi adalah

upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

Menurut Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSTEK) Daerah Irigasi Limau Manis Tahun 2009, kegiatan pemeliharaan irigasi yang dilakukan di Daerah Irigasi Limau Manis meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan darurat dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan perawatan pada jaringan irigasi yang biasa dilaksanakan setiap tahun atau setiap musim tanam, Pemeliharaan berkala adalah kegiatan perbaikan pada jaringan irigasi yang biasanya dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun, sedangkan kegiatan perbaikan darurat adalah kegiatan perbaikan sebagai akibat bencana alam, dengan upaya asal air irigasi dapat mengalir, agar fungsi jaringan irigasi dapat melayani daerah irigasi dan dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Tergantung pada tingkat kerusakannya, maka pelaksana kegiatan pemeliharaan ini bisa dilakukan oleh petani, pengurus P3A/Federasi P3A, atau petugas pemerintah atau secara bersama-sama (kondisi seperti ini dengan sendirinya memerlukan musyawarah untuk kesepakatan).

Menurut Helmi (1992), manusia yang mengoperasikan dan memelihara sistem irigasi ini terdiri dari dua kelompok yang sama-sama mempunyai kepentingan terhadap sistem irigasi yaitu:

- a. Petani yang mempunyai kepentingan secara mikro yaitu keberlangsungan ekonomi keluarga.
- b. Pemerintah yang mempunyai kepentingan secara makro yaitu penyediaan pangan secara nasional.

2.2.3 Rehabilitasi

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Suatu jaringan irigasi meskipun dioperasikan dan dipelihara sebaik-baiknya, pada suatu saat akan sampai pada batas masa pelayanannya.

Panjang atau pendeknya masa pelayanan suatu jaringan irigasi akan tergantung kepada: 1)Keadaan sumber airnya; 2)Konstruksi (permanent, semi

permanent atau sederhana); 3) Pelaksanaan O & P nya; dan 4) Keadaan alamnya (jenis tanah, kemiringan tanah, curah hujan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya). (Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif, 2005)

Diharapkan masa pelayanan dari suatu jaringan irigasi mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun setelah pembangunan, dan biasanya fungsi pelayanan jaringan irigasi turun kurang 60%, sedang kerusakan bangunan-bangunan dan saluran irigasi lebih kurang 40%. Dari pengertian rehabilitasi tersebut di atas maka rehabilitasi adalah perbaikan baik bangunan maupun saluran-saluran seluruh jaringan irigasi dalam satu daerah irigasi, namun demikian dalam perakteknya akhir-akhir ini suatu bendung yang mercunya rusak dan runtuh, perbaikan mercu bendung tersebut masuk kategori rehabilitasi.

Suatu jaringan irigasi dapat dikatakan telah berfungsi dengan baik apabila dapat mengairi menurut jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam rancangan jaringan irigasi. Bila air dialirkan melalui irigasi dapat dimanfaatkan secara efisien bagi peningkatan produksi tanaman pertanian, maka dapat dikatakan pembangunan irigasi berhasil, artinya IRR irigasi maksimum diatas tingkat bunga (Tim peneliti Wale Sea dalam Hidayat 2003).

2.2.4 Pengerahan Sumber Daya

Pengerahan sumberdaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menyumbangkan sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya yang dikerahkan dapat berupa tenaga, materi maupun *financial* atau uang.

Pengerahan sumberdaya untuk irigasi dilaksanakan pada saat, perencanaan pembangunan irigasi dan pada saat pengoperasian. Pada saat pengoperasian pengerahan sumberdaya mencakup aktifitas-aktifitas pengalokasian dan pendistribusian air, pemeliharaan irigasi, dan penyelesaian konflik. Sumberdaya yang dominan dikerahkan adalah tenaga kerja, dan sedikit sekali yang diiringi dengan pengerahan sumberdaya material. Pengerahan sumberdaya ada yang secara perorangan dan berkelompok, pengerahan sumberdaya perorangan didorong oleh kepentingan pribadi yang bersangkutan, sementara pengerahan sumberdaya kelompok didorong apabila kepentingan pribadi sejalan dengan kepentingan kelompok. Dengan makin beragamnya kepentingan pribadi dan

kepentingan kelompok, maka pengeralahan sumberdaya kelompok makin sulit dilaksanakan. Pada konteks keragaman kepentingan itu, ada dua hal yang mungkin mendorong pengeralahan sumberdaya kelompok, yaitu kekuatan solidaritas (*solidarity Force*) dan kekuatan paksaan (*Coercive force*) (Iskandar,dkk 2005)

Menurut Martius (1992) ada 4 tingkatan dalam pengeralahan sumber daya pada suatu irigasi yaitu:

- a. Tingkat I. Pengeralahan sumber daya hanya melibatkan sebagian (sekelompok petani) yang memperoleh manfaat dari irigasi yang bersangkutan. Pengeralahan sumber daya hanya dilaksanakan oleh sekelompok petani dari kawasan hilir daerah irigasi atau sekelompok petani pemilik sawah.
- b. Tingkat II (*irrigation system level*). Pengeralahan sumberdaya melibatkan petani yang memperoleh manfaat dari irigasi tersebut yaitu pemilik, petani penggarap dari kawasan hulu sampai hilir.
- c. Tingkat III (*community level*). Pengeralahan sumber daya oleh petani yang memperoleh manfaat dari irigasi dibantu oleh kelompok masyarakat lain, misalnya nagari. Ini disebabkan kebutuhan irigasi terhadap sumber daya begitu tinggi.
- d. Tingkat IV (*macro level*). Pengeralahan sumberdaya sudah melibatkan potensi sumberdaya diluar unit masyarakat yang paling besar seperti nagari dan sudah ada keterlibatan pemerintah.

2.2.5 Penanganan Konflik

Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik

bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi (Gibson, 1997).

Menurut Iskandar,dkk 2004, ada beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan konflik di Daerah Irigasi diantaranya: 1) Turunnya debit air; 2) Ketidakadilan dalam memperoleh air; dan 3) Kelembagaan Kurang Berfungsi Baik.

Perseteruan antara kelompok-kelompok pengguna air, dari dahulu hingga sekarang, selalu saja melatarbelakangi pentingnya birokrasi dalam pengelolaan sumberdaya air. Birokrasi adalah penegak aturan main dalam pengelolaan sumberdaya air. Jika aturan-aturan terpakai (*rule in use*) dinilai tidak lagi adil, dalam pengertian tidak bisa melindungi kepentingan petani, maka semestinya dilakukan penyesuaian kelembagaan yang memihak kepada petani dimana birokrasi seharusnya berperan memfasilitasi penyesuaian kelembagaan tersebut, yaitu melalui penyesuaian peran-perannya (Martius, 1997).

Adanya permasalahan pembonceng gratis yang umumnya dijumpai pada arena pengelolaan sumberdaya air berakibat kepada ketidakpastian atas akses dan penguasaan terhadap air (*no certainty about tenure*). Ini berimplikasi bahwa investasi oleh pengguna-pengguna air untuk pengembangan sumberdaya air akan cenderung jauh lebih rendah daripada tingkat potensialnya. Antisipasi terhadap permasalahan ini lebih mungkin dilakukan dengan upaya membangun kerja bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan, dan terutama untuk memaksimumkan perilaku pengguna-pengguna air (*maximizing behavior*). Secara sederhana, upaya dimaksud akan beroperasi jika kerja bersama dalam pendayagunaan sumberdaya air antara *stakeholders* dibingkai dalam format yang *obligatory-based* (Martius, dkk. 1997).

2.3 Konsepsi Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Kelembagaan mengandung makna aturan main yang dianut masyarakat atau anggota yang dijadikan pedoman oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh anggota organisasi dalam melakukan transaksi (North, 1991).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33 /prt/m/2007 Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Dalam konteks otonomi daerah, persepektif organisasi P3A yang dimaksud adalah P3A yang mandiri dalam organisasi dan manajemen pengelolaan keuangan, pembiayaan OP dan menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Selama ini kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan P3A memandang institusi tersebut sebagai lembaga sosial, disisi lain P3A sebagai organisasi pengelola air irigasi ditingkat lokal semakin dituntut peranannya dalam pengalokasian sumber daya air yang kompetitif untuk berbagai kepentingan. Hal ini mengandung kontradiksi apakah sifat sosial ini masih perlu dipertahankan dalam menghadapi sistem pengelolaan air irigasi yang semakin kompetitif (Kurnia, 2000).

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:

- a. Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial.
- b. Terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional.
- c. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain.
- d. Makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta. P3A menyediakan

pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian (PP RI no 20 tahun 2006)

2.4 Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Irigasi

Irigasi mempunyai fungsi untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan nasional, dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, yang diwujudkan dengan mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi melalui penyelenggaraan sistem irigasi (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Indonesia 2005).

Pelaksanaan pembangunan sumber daya air melalui prasarana keirigasian yang dilakukan selama ini mempunyai kelemahan yang ditunjukan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, rendah efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan cepat terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi, hal itu disebabkan oleh pendekatan dari atas ke bawah (*top down*) didalam pembangunan irigasi, tidak sesuai dengan sifat irigasi yang memiliki karakteristik sosio teknis, (Perdana, 2002).

Berdasarkan PPRI No 20 tahun 2006, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani. Yang dimaksud dengan terpadu adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.

Transparan dan akuntabel adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan

masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir. Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan hidup adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh P3A atau oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan sistem irigasi. Dalam hal pembangunan baru, sistem irigasi dilaksanakan pada wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi. Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tenaga, material, dan dana.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2006 pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat petani berupa melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Dilain pihak rehabilitasi prasarana jaringan irigasi harus dilakukan sebelum umurnya dilampaui, hal itu disebabkan oleh pelaksanaan OP jaringan irigasi tidak sebagaimana diharapkan karena keterbatasan dana, SDM dan kelengkapan sistem irigasi serta petani pemanfaatan kurang dilibatkan pada tahap pembangunan sesuai dengan semangat pembaharuan serta diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi dengan sistem nilai sebagai berikut: Adanya penunjukan kesepakatan petani, pemanfaatan tidak hanya untuk tanam padi, debirokratisasi dan devolusi dalam pengelolaan irigasi demokratisasi, partisipasi, pemberdayaan petani, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan holistik serta sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan (Perdana, 2002).

2.5 Motivasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi

Motivasi berasal dari kata “motif” yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman, 2005).

Menurut Purwanto (2002) *dalam* Sadirman (2005), motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Hamalik 2002 *dalam* Sadirman 2005).

Menurut Hadi (2008), motivasi petani dalam pengelolaan irigasi terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan tingkat pendapatan. Faktor eksternal terdiri dari, luas lahan, kondisi lahan dan jarak antara saluran dan lahan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi R Indrawati, Evi Irawan, Nana Haryanti, dan Dody Yuliantoro (2003) tentang Partisipasi Masyarakat dalam

Upaya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) di Jawa Tengah pada Kabupaten Sragen (Sub DAS Padas) dan Kabupaten Karanganyar (Sub DAS Samin) menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersumber dari dalam diri masyarakat (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mulai dari awal kegiatan (inventarisasi) sampai dengan implementasi rencana penghijauan, ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada kedua desa lokasi penelitian yaitu tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan pendapatan (faktor internal), serta luas lahan, kondisi lahan dan kegiatan penghijauan yang pernah dilaksanakan (faktor eksternal). Faktor biaya dan manfaat yang secara teori dinyatakan berpengaruh pada tingkat partisipasi, dalam bahasan ini tidak disampaikan karena sampai saat ini masyarakat belum merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Sedang untuk biaya berkaitan erat dengan pendapatan, artinya meskipun biaya tinggi apabila dari segi pendapatan memungkinkan, maka ada kemungkinan hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Ridwan Maksum (2006) tentang Desentralisasi dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier (Suatu Studi dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial dan Fungsional di Kabupaten dan Kota Tegal, Jawa Tengah, di Kabupaten Jembrana, Bali, dan di Hulu Langat, Selangor, Malaysia) menyimpulkan bahwa praktek desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi teritorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level *grassroots* dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya *regime* irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali

memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Purbathin Hadi (2008) tentang Rekayasa Kelembagaan dan Komunikasi untuk Mengembangkan Partisipasi Petani dalam Investasi Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Lombok Timur, menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan proses pemberdayaan, apabila dilakukan secara partisipatif dengan *beneficiaries* dan *stakeholders* akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat. Dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, diperlukan fasilitator, penggerak atau agen pembangunan (*development agent*) untuk membantu masyarakat dalam merumuskan masalah yang dihadapi dan mengenal potensi yang dimiliki masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* akan membantu proses konvergensi dan divergensi berpartisipasi dalam proses perencanaan, implementasi, O dan P, yang pada gilirannya melahirkan komitmen dan tanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Rian Hidayat (2003) tentang Pola Hubungan Kerjasama antar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Irigasi Pemerintah di Daerah Irigasi Tuo Kanan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong terbentuknya kerja sama antar P3A terdapat pada pemeliharaan saluran dan ketersediaan air ini disebabkan oleh dinas terkait kekurangan petugas, sedangkan kerja sama dengan pemerintah dipengaruhi oleh faktor bantuan dana. Permasalahan kerja sama terjadi karena masih rendahnya peran serta anggota P3A dalam perencanaan kerjasama, karena perencanaan kerjasama bersifat informal. Secara ringkas dapat dilihat pada matrik berikut:



Komunikasi Untuk Mengembangkan Partisipasi Petani Dalam Investasi Infrastruktur Pertanian/ Agus Purbathin Hadi	Komunikasi Untuk Mengembangkan Partisipasi Petani Dalam Investasi Infrastruktur Pertanian	2. Partisipasi petani dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur pertanian secara partisipatif.	<p><i>stakeholders</i> akan menumbuhkan tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat</p> <p>2. Dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, diperlukan fasilitator, penggerak atau agen pembangunan (<i>development agent</i>) untuk membantu masyarakat dalam merumuskan masalah yang dihadapi dan mengenal potensi yang dimiliki masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> akan membantu proses konvergensi dan divergensi sumberdaya bagi proses pembangunan pedesaan</p>	partisipasi	partisipasi petani dalam infra struktur pertanian dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> , peneliti meneliti tentang partisipasi dalam pengelolaan
Pola Hubungan Kerjasama antar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Irigasi Pemerintah di Daerah Irigasi Tuo Kanan Kecamatan Koto Tangah Kota Padang/ Rian Hidayat	<p>1. Mengidentifikasi bentuk dan pola kerjasama antar P3A</p> <p>2. Mengidentifikasi permasalahan aktivitas kerjasama</p> <p>3. Mengidentifikasi partisipasi P3A dalam kerjasama</p> <p>4. Mengidentifikasi faktor yang mendorong kerjasama P3A</p>	<p>1. Pengalaman kerjasama</p> <p>2. Tingkat kerjasama</p> <p>3. Manfaat kerjasama</p> <p>4. Permasalahan</p> <p>5. Partisipasi anggota P3A</p> <p>6. Faktor yang mendorong terbentuknya kerjasama</p>	<p>1. Faktor yang mendorong terbentuknya kerjasama antar P3A terdapat pada pemeliharaan saluran dan ketersediaan air ini disebabkan oleh dinas terkait kekurangan petugas, sedangkan kerjasama dengan pemerintah dipengaruhi oleh faktor bantuan dana.</p> <p>2. Permasalahan kerjasama terjadi karena masih rendahnya peran serta anggota P3A dalam perencanaan kerjasama, karena perencanaan kerjasama bersifat informal.</p>	Sama-sama meneliti partisipasi anggota P3A	Peneliti terdahulu meneliti tentang pola kerjasama antar P3A, peneliti meneliti tentang pengelolaan irigasi oleh satu P3A

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Irigasi Limau Manis, yaitu pada dua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang terdapat di hulu yaitu P3A Kelurahan Limau Manis dan P3A yang terdapat di hilir yaitu P3A Kelurahan Koto Lalang.

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena, 1) Daerah Irigasi Limau Manis adalah sebuah Daerah irigasi yang dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) yang dibangun sejak lama yaitu tahun 1974, 2) Untuk melihat perbandingan partisipasi petani yang berada di hulu dan yang di hilir, 4) mengingat keterbatasan waktu dan dana maka dipilihlah irigasi limau manis ini.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, mulai Bulan Oktober sampai November 2010.

3.2 Metode Penelitian dan Pengambilan sampel

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu studi kasus (*case study*). Dimana Menurut Nazir (2005) studi kasus digunakan untuk meneliti sebuah kasus yang khas pada keseluruhan personalitas yang subjeknya dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Kasus pada penelitian ini adalah tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi tersier. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu petani anggota P3A di Daerah Irigasi Limau Manis.

Untuk melihat partisipasi anggota P3A dalam pengelolaan irigasi tersier diambil sampel secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) pada dua P3A yaitu P3A Kelurahan Limau Manis (hulu) dan P3A Koto Lalang (hilir). Populasi petani yang tergabung dalam P3A berjumlah 508 orang, yaitu 221 orang anggota P3A Limau Manis dan 287 orang anggota P3A Koto Lalang, maka sampel diambil sebanyak 15%. Sehingga jumlah petani sampel yang diperoleh 76 orang, 33 orang dari P3A Limau Manis dan 43 orang dari P3A Koto Lalang. Menurut Surachmad (1982) dalam Idola (2008) pengambilan jumlah sampel ditentukan, apabila jumlah populasi kurang dari 100 diambil sebanyak 50%,

apabila jumlah populasi berkisar antara 100-1000 diambil sebanyak 15%-50% dan jika jumlah populasi lebih dari 1000 maka diambil sebanyak 10%-15%.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Data Primer

Pengumpulan data primer dengan jalan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sumber data primer di antaranya: pengurus P3A, petani sampel, tuo banda, dan juru pengairan

3.3.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan jalan dikumpulkan dari data instansi-instansi terkait dalam penelitian ini yang dapat memberikan data untuk menunjang data primer seperti pengurus P3A, Kepala Cabang Dinas Pertanian Pauh Kota Padang, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

3.4 Topik Data Penelitian

Topik data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menurut tujuan penelitian terdiri dari sub-sub topik sebagaimana terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Topik Data Penelitian

No	Tujuan/ Topik Data	Sub-Sub Topik
1	Mengukur tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi	
a)	Operasi jaringan irigasi	a. Pengaturan air dan pembuangan air b. Menyusun rencana tata tanam c. Menyusun rencana pembagian air
b)	Pemeliharaan jaringan irigasi	a. menyusun rencana pemeliharaan b. Ikut pemeliharaan darurat c. Ikut pemeliharaan rutin d. Ikut pemeliharaan berkala
c)	Rehabilitasi jaringan irigasi	a. menyusun rencana rehabilitasi b. melaksanakan kegiatan rehabilitasi
d)	Pengeralahan sumber daya	a. Pengerahan tenaga b. Pengerahan materi

Keterangan:

1. Operasi
 - a. Pengaturan air dan pembuangan air
 - b. Membuka menutup pintu bangunan
 - c. Menyusun rencana tata tanam
2. Partisipasi petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi
 - a. Menyusun rencana pemeliharaan
 - b. Ikut pemeliharaan darurat
 - c. Ikut pemeliharaan rutin
 - d. Ikut pemeliharaan berkala
3. Partisipasi petani dalam rehabilitasi jaringan irigasi
 - a. Menyusun rencana rehabilitasi
 - b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi
4. Partisipasi petani dalam penerahan sumber daya
 - a. Penerahan tenaga
 - b. Penerahan materi
 - c. Penerahan finansial
5. Partisipasi petani dalam penanganan konflik
 - a. Mengidentifikasi penyebab konflik
 - b. Mengupayakan penyelesaian konflik

(Sumber PPRI No 20 tahun 2006)

Untuk menguji nilai skor yang diperoleh ditentukan melalui rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai rata-rata} = \sum Ni/n$$

Dimana :

Ni = Jumlah skor partisipasi

n = Jumlah item

Berdasarkan nilai skor partisipasi dalam setiap tahap kegiatan diatas, kemudian dipersentasekan dengan menggunakan rumus (Slamet dalam Idola 2003):

$$\text{Tingkat partisipasi} = \frac{\text{Total skor yang diperoleh}}{\text{Total skor yang diharapkan}} \times 100\%$$

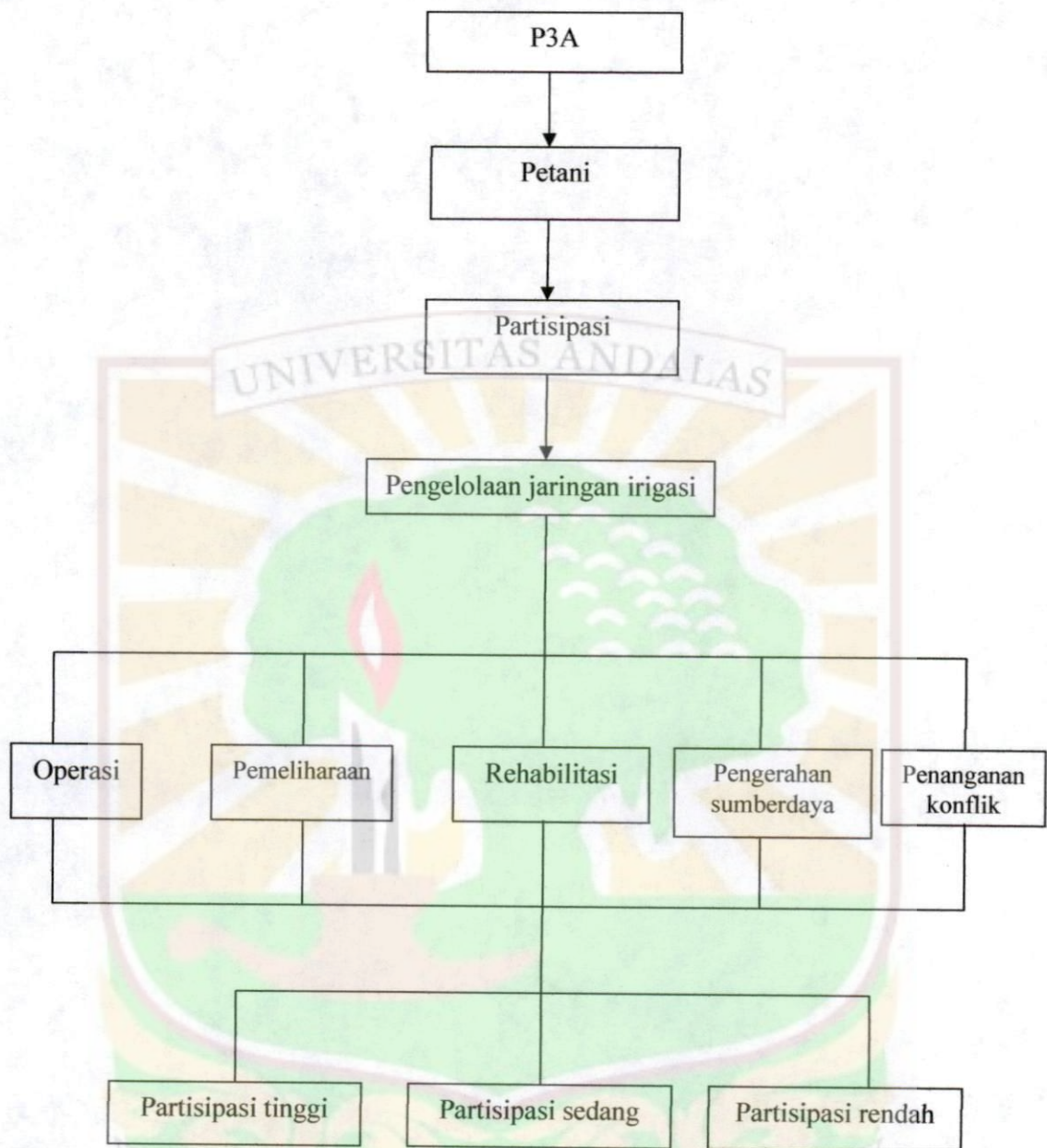
Sehingga persentase tingkat partisipasi tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Partisipasi tinggi, bila persentase yang diperoleh antara 68-100%
- b. Partisipasi sedang, apabila persentase yang diperoleh antara 34-67%
- c. Partisipasi rendah, bila persentase yang diperoleh antara 0-33%

Analisa data pada tujuan kedua dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Menurut Nasution (2005), analisa kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami responden, akhirnya dicarikan rujukan teorinya. Pada tujuan kedua ini berdasarkan variabel yang diamati dalam melihat motivasi petani dalam berpartisipasi, maka pada hasil akhirnya nanti akan diketahui apa pengaruh dari motivasi tersebut terhadap partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi

3.6 Kerangka Pemikiran

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi petani dalam peningkatan pendapatan usaha petani mereka adalah ketersediaan air yang juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya, jika air yang tersedia sesuai sesuai dengan kebutuhan petani, maka kegiatan pertanian dapat berlanjut dan hasil yang diperoleh akan memuaskan sehingga dapat mencapai kesejahteraan petani. Ketersediaan air yang cukup juga dipengaruhi oleh pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh petani.

Kerangka Pikir Penelitian**Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian**

3.7 Defenisi Operasional

1. Partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi adalah keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi seperti operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengerahan sumberdaya, dan penganan konflik.
2. Tingkat partisipasi adalah persentase partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, dapat dikategorikan sebagai tinggi, sedang dan rendah yang diketahui melalui skor yang diperoleh
3. Partisipasi petani dikatakan tinggi apabila petani melaksanakan semua item penilaian partisipasi dalam pengelolaan irigasi dan irigasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya
4. Nilai yang diharapkan adalah nilai yang diharapkan muncul dari setiap item partisipasi yaitu 2 untuk masing-masing item, dan dikalikan dengan banyaknya sampel
5. Nilai yang diperoleh adalah nilai yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dilapangan, nilai bisa bervariasi seperti 2 untuk jawaban selalu, 1 untuk jawaban kadang-kadang, dan 0 untuk jawaban tidak pernah
6. Motivasi petani dalam pengelolaan irigasi adalah segala sesuatu yang berasal baik dari dalam diri petani ataupun yang berasal dari luar diri petani yang nantinya akan mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi
7. Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi petani adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri petani yang dapat mempengaruhi partisipasi petani
8. Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi petani adalah semua faktor yang berasal dari luar diri petani yang dapat mempengaruhi partisipasi petani
9. Pendidikan formal maksudnya adalah tingkat pendidikan petani yang ditempuh petani dijenjang pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi
10. Pendidikan non formal adalah pendidikan atau pengetahuan yang diperoleh petani selain berasal dari pendidikan formal, seperti adanya pelatihan
11. Tingkat pendapatan adalah jumlah pendapatan petani setiap bulannya atau setiap periode penanaman sehingga dapat mempengaruhi partisipasi petani

12. Luas lahan adalah ukuran luas lahan yang dimiliki petani yang dapat diukur dalam hektar, nantinya akan mempengaruhi partisipasi petani
13. Jarak antara saluran adan lahan adalah ukuran jarak anantara saluran irigasi dengan sawah milik petani yang dinyatakan dalam ukuran meter



Table 3.3. Matrik Data Set

Tujuan	Variabel	Indikator	Alat ukur	Data dan Sumber data	Teknik pengumpulan data
1. Mengukur tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi	a. Partisipasi petani dalam pengoperasian jaringan irigasi	Pengaturan dan pembuangan air, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air.	Partisipasi tinggi apabila 68-100% petani melakukan kegiatan operasi, sedang apabila 34-67%, dan rendah apabila 0-33%	Data primer dan data sekunder. Data bersumber dari, Pengurus dan anggota P3A	Wawancara dengan key informan, daftar isian (kuisioner, studi kepustakaan (laporan buku profil dll))
	b. Partisipasi petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi	ikut merencanakan kegiatan pemeliharaan dan ikut melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi	Partisipasi tinggi apabila 68-100% petani melakukan kegiatan pemeliharaan, sedang apabila 34-67%, dan rendah apabila 0-33%		
	c. Partisipasi petani dalam rehabilitasi jaringan irigasi	Ikut merencanakan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, ikut melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi	Partisipasi tinggi apabila 68-100% petani melakukan kegiatan rehabilitasi, sedang apabila 34-67%, dan rendah apabila 0-33%		
	d. Pengerahan sumber daya	Pengerahan tenaga, pengerahan materi dan pengerahan finansial	Partisipasi tinggi apabila 68-100% petani mengerahkan sumberdaya, sedang apabila 34-67%, dan		

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Irigasi Limau Manis

A. Profil Umum

Daerah irigasi Limau Manis secara administratif termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Luas daerah irigasi Limau Manis ini adalah 555 Ha dengan sumber air Sungai Batang Limau Manis. Daerah irigasi Limau Manis mengalir areal sawah pada 7 (tujuh) kelurahan, yakni Kelurahan Limau Manis, Kelurahan Kapalo Koto, Kelurahan Piai Tengah, Kelurahan Cupak Tengah, Kelurahan Koto Tuo. Kelima kelurahan ini terletak di Kecamatan Pauh. Dua kelurahan lagi yaitu Kelurahan Bandar Buat dan Kelurahan Koto Lalang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan. Daerah Irigasi Limau Manis mempunyai (tujuh) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yaitu P3A Limau Manis, P3A Kapalo Koto, P3A Piai Tengah, P3A Cupak Tengah, P3A Koto Tuo, P3A Bandar Buat dan P3A Koto Lalang. Kemudian 2 (dua) GP3A yaitu GP3A Limapal dan GP3A Ameh Sapuro.

B. Profil Sumber, Ketersediaan dan Alokasi Air Irigasi

Sumber utama air irigasi adalah Sungai Batang Limau Manis, sedangkan sumber air penunjang (suplesi) adalah Bandar Duku, Batu Busuak, Bandar Kampus dan Gunung Nago. Pada musim hujan (Musim Tanam I) debit air pada DILM adalah 5000 l/detik, sedangkan pada musim kemarau (Musim Tanam II) debit air adalah 2000 l/detik dan 400 l/detik (Musim Tanam III). Alokasi penggunaan air irigasi adalah untuk domestik, pertanian, industry, kolam dan PDAM.

C. Profil Teknik

Kondisi fisik jaringan irigasi Limau Manis adalah sebagai berikut :

- a. Jaringan primer: terdapat sedimen serta kondisi serta kondisi intake bendungan yang rusak berat. Pada saat ini bendung dalam proses perbaikan.

- b. Jaringan sekunder: saluran rusak belum dilening serta banyak sedimen. Kondisi bangunan sadap juga banyak yang mengalami kerusakan serta belum dilening.
- c. Jaringan tersier: sebagian saluran belum dilening serta banyak sedimen.

D. Profil Sosial Ekonomi

Sekitar 80 % masyarakat disekitar DI mempunyai mata pencaharian bertani, sisanya 5 % buruh industry, 6 % pedagang, 5 % pegawai dan 4 % lainnya. Status petani dalam kegiatan pertanian adalah 1,15 % (28 orang) pemilik lahan, 56,7 % (1373 orang) pemilik penggarap, 40,8 % (989 orang) penggarap serta 1,2% (30 orang) penyewa lahan. Tingkat pendidikan masyarakat petani adalah 25% Sekolah Dasar, 55% Sekolah Menengah Pertama, 7 % Sekolah Menengah Atas, 0,5 % Sarjana, 12,5 % lainnya. Masyarakat petani pada DI Limau Manis mempunyai kebiasaan setelah panen yakni potong kambing/pembersihan di hulu banda serta berburu tikus.

E. Profil Kelembagaan

P3A/GP3A yang berada pada DI Limau Manis dibentuk berdasarkan musyawarah dengan AD/ART organisasi yang disusun oleh pengurus P3A/GP3A bersama lembaga lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun AD/ART ini belum sepenuhnya bisa direalisasikan sesuai dengan ketepatan, <25%. Dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A, pemerintah Kota Padang sudah memfasilitasi kegiatan pemberdayaan P3A dan GP3A. bentuk fasilitasi yang sudah diberikan adalah pelatihan dan pelaksanaan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSTEK), pembentukan organisasi, pengembangan badan hukum, pelatihan organisasi, pelatihan teknis irigasi, pelatihan usaha tani, dan kegiatan pendampingan. Namun anggota P3A kurang bisa memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan tersebut dengan optimal.

F. Pola Tanam

Jika dilihat dari pola tanam Daerah Irigasi (DI) Limau Manis, DI Limau Manis melakukan pola tanam dua kali dalam setahun yaitu Musim Tanam I (MT





I) yang dimulai bulan Oktober- Maret, terjadi pada musim hujan dan Musim Tanam II (MT II) pada bulan April- September yang terjadi pada musim kemarau. Tanaman yang di budidayakan berupa padi sawah dan palawija, tetapi dalam pelaksanaannya hanya sedikit sekali petani yang melakukan penanaman palawija, sehingga penanaman padi dilakukan sampai 3 x setahun. pada gambar 3.1 dapat dilihat pola tanam pada DI Limau Manis, dalam setiap bulannya di buat I dan II, maksudnya adalah I untuk 15 hari pertama dan II adalah 15 hari kedua. Ini merupakan laporan pelaksanaan pola tanam DI limau manis yang dibuat oleh juru pengairan, pelaporannya dilakukan setiap 15 hari.



Gambar 4.1 Pola Tanam DI Limau Manis

Bulan	April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		Januari		Februari		Maret	
Minggu	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
MT I																								
MT II																								

Sumber : UPTD Gunung Nago

Ket :  Pengolahan Lahan
 Padi tumbuh
 Palawija
 Masa bero



4.1.2 Identitas Responden

A. Identitas Informan Kunci

Informan kunci yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Dimana masing-masing informan kunci memiliki karakteristik yang berbeda ditinjau dari keikutsertaan dalam P3A, pendidikan, luas lahan dan pekerjaan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan Kunci

No	Uraian	Jumlah (orang)	Persentase(%)
1.	Pendidikan		
	a. Tamat SD	4	40
	b. Tamat SLTP	3	30
	c. Tamat SLTA	1	10
	d. Tamat Perguruan Tinggi	2	20
2.	Pekerjaan		
	a. Petani	8	80
	b. Staf Kimpraswil	2	20
3.	Luas lahan (Ha)		
	a. 0	1	10
	b. < 0,5	2	20
	c. 0,5 – 1,0	7	70
4.	Jabatan Informan Kunci		
	a. Ketua P3A	1	10
	b. Wakil Ketua P3A	1	10
	c. Ketua Kelompok Tani	5	50
	d. Tuo Banda	1	10
	e. Juru Pengairan	1	10
	f. Kep. UPTD Kimpraswil Wil. 1	1	10

Dari Tabel 4.1 tingkat pendidikan informan kunci paling banyak yaitu tamat SD sekitar 4 orang (40%), tamat SLTP 3 orang (30%), tamat Perguruan Tinggi 2 orang (20%), dan tamat SLTA 1 orang (10%).

Pekerjaan informan kunci yang paling banyak adalah petani yaitu 8 orang (80%), dan sebagai staf Kimpraswil sebanyak 2 orang (2%). Luas lahan yang diusahakan oleh informan kunci yang paling banyak berkisar 0,5 – 1 Ha yaitu sebanyak 7 orang (70%), dan yang kurang dari 0,5 Ha sebanyak 2 orang (2%), dan yang tidak punya lahan 1 orang (10%). Jabatan informan kunci dalam penelitian ini adalah ketua P3A 1 orang (10%), wakil ketua P3A 1 orang (10%), ketua kelompok tani sebanyak 5 orang (50%), tuo banda 1 orang (10%), juru pengairan 1 orang (10%), dan kepala UPTD Kimpraswil Wilayah I 1 orang (10%).

B. Petani Sampel

Petani sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 76 orang. Dimana masing-masing petani sampel memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat ditinjau dari tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, luas lahan, status kepemilikan lahan, pekerjaan sampingan, lama bertani dan lokasi sawah petani sampel dalam Daerah Irigasi, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Karakteristik Petani Sampel

No	Uraian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tingkat umur (tahun)		
	a. 30-39	20	26,32
	b. 40-49	25	32,89
	c. >50	31	40,79
2.	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	58	76,32
	b. Perempuan	18	26,68
3.	Tingkat pendidikan		
	a. Tamat SD	43	56,58
	b. Tamat SLTP	11	14,47
	c. Tamat SLTA	19	25
	d. Tamat PT	3	18,75
4.	Luas lahan (Ha)		
	a. < 0,5	21	27,63
	b. 0,5 - 1	55	72,37
5.	Status lahan		
	a. Pemilik	37	48,68
	b. Penggarap	39	51,32
8.	Lokasi sawah		
	a. Hulu	33	43,42
	b. Hilir	43	56,58

Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa tingkat umur petani 30 hingga 39 tahun berjumlah 20 orang (26,32%) umur 40-49 tahun 25 orang (32,89%) dan umur lebih dari 50 tahun (40,79 %).

Menurut Soeharjo dan Patong (1973) dalam Idola (2008), umur petani mempengaruhi kemampuan fisik dan cara berfikir. Petani yang umurnya lebih muda akan cepat menerima hal-hal baru dan lebih berani mengambil resiko, lebih cepat mendapat pengalaman yang berguna untuk perkembangan hidupnya. Maka dengan adanya umur petani yang masih produktif, diharapkan petani memiliki kemampuan berpartisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier serta mampu memberikan kontribusi dalam pemeliharaannya.

Untuk jenis kelamin petani sampel, jumlah laki-laki lebih banyak sekitar 58 orang (76,32%) sedangkan perempuan sekitar 18 orang (26,68%) bukan berarti mereka terabaikan dalam pengelolaan irigasi tersier, karena pengelolaan irigasi tersier merupakan tanggung jawab semua *stakeholders* yang merasakan manfaatnya.

Dari segi pendidikan petani sampel terdapat tamatan SD sekitar 43 orang (56,58%), tamatan SLTP sekitar 11 orang (14,47%), tamatan SLTA sekitar 19 orang (25%), sedangkan yang tamatan Perguruan Tinggi masih sedikit yaitu sekitar 3 orang (18,75%) hal ini memungkinkan petani untuk dapat mengelola irigasi secara partisipatif karena pengalaman pendidikan yang dilalui petani sampel merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam pengelolaannya.

Lahan yang dimiliki petani beragam yaitu berkisar dibawah 0,5 Ha, hingga 1 Ha, petani yang memiliki lahan dibawah 0,5 dijumpai sekitar 21 orang (27,63%), sedangkan petani yang memiliki lahan terbanyak yaitu berkisar 0,5 – 1 Ha yaitu sekitar 55 orang (72,37%). Disamping itu status kepemilikan lahan petani sampel juga beragam, ada petani sampel yang memang mengolah lahannya sendiri dan ada juga hanya sebagai penggarap di lahan orang lain. Petani yang lahannya miliki sendiri yaitu sekitar 37 orang (48,68%), petani yang menjadi penggarap yaitu hanya sekitar 39 orang (51,32%), sedangkan jika dilihat dari lokasi dimana letak sawah petani sampel, sebagian besar terletak di hilir yaitu sekitar 43 orang (56,58 %), dan yang terletak di hulu sekitar 33 orang (43,42%).

4.1.3 Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis

Kegiatan pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengalokasian sumber daya dan penanganan konflik. Kegiatan pengelolaan pada penelitian ini dilihat pada jaringan irigasi tersier dibagian hulu dan dibagian hilir, serta peran P3A dalam kegiatan pengelolaan tersebut.

Pengelolaan irigasi di tingkat primer merupakan tanggung jawab pemerintah, pengelolaan ini meliputi pelaksanaan O&P jaringan dan rehabilitasi serta pembiayaan O&P jaringan dan rehabilitasi, sedangkan petani selain menjaga dan melestarikan, juga ikut terlibat dalam operasi dan pemeliharaannya.

Pada tingkat sekunder pemerintah bertanggung jawab menentukan rencana tata tanam sesuai usulan P3A, pengalokasian jatah air pelaksanaan O&P jaringan dan rehabilitasi, sedangkan petani selain menjaga dan melestarikan, juga ikut terlibat dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan.

A. Operasi

Kegiatan operasi jaringan irigasi ditingkat tersier ini berkaitan dengan kegiatan pengaturan air irigasi, pembagian air dan rencana tata tanam. Selain partisipasi petani peran P3A juga sangat diperlukan dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan operasi ini P3A mempunyai peran sebagai pengawas serta pengambil keputusan untuk terlaksananya kegiatan.

Peran P3A dalam kegiatan operasi ini terwujud dalam berbagai bentuk yang dilakukan secara kerjasama dengan anggota perkumpulan. Sebelum dilakukan distribusi dan pembagian air, terlebih dahulu dilakukan penyusunan rencana tata tanam. Penyusunan rencana tata tanam berisi antara lain kapan kegiatan pola tanam dilakukan dan kebutuhan air yang diperlukan. Untuk kegiatan rencana tata tanam pada P3A Limau Manis telah menetapkan 2 x setahun penanaman padi yang diselingi dengan penanaman palawija. Tetapi dalam pelaksanaannya hanya sedikit sekali petani yang melakukan penanaman palawija, sehingga penanaman padi dilakukan sampai 3 x setahun.

Pembagian air dilaksanakan mulai dari kegiatan pengolahan sampai sawah sudah tidak membutuhkan air lagi. Pada P3A Limau Manis tidak mengenal sistem

pergiliran dalam pembagian air, ini dikarenakan persediaan air yang cukup bahkan pada waktu musim kemarau sekalipun. Setelah penyusunan rencana tata tanam dilakukan maka petugas PPA mulai membuka saluran untuk mengairi sawah petani. Untuk kegiatan pembagian air terdapat dalam beberapa tahapan:

- a. Menjelang musim tanam, pada saat menjelang musim tanam kegiatan yang dilakukan adalah pengolahan lahan sampai pada penyemaian benih. Pada kegiatan ini sawah sedang membutuhkan banyak air. Jumlah air yang diberikan untuk kegiatan menjelang musim tanam ini adalah sebanyak 1,25 liter per detik.
- b. Selama musim tanam berlangsung, setelah penyemaian benih dilakukan selanjutnya dilakukan kegiatan penanaman benih, untuk kegiatan ini air yang dibutuhkan tidak sebanyak pada masa pengolahan dan penyemaian. Jumlah air yang diberikan selama kegiatan ini adalah sebanyak 0,85 liter per detik. Untuk mengurangi masuknya air kesawah maka petani menutup sedikit pintu saluran dengan cara manual yaitu menyumbatnya dengan batu yang disusun menyerupai bendungan. Kegiatan ini berlangsung sampai pada tanaman mulai terlihat buahnya.
- c. Menjelang panen, pada saat menjelang panen sawah sudah tidak membutuhkan air lagi. Air yang mengalir kesawah sangat sedikit dan hanya untuk menjaga kelembaban tanah. Dan apabila sudah datang musim panen maka saluran ditutup sampai air tidak bisa mengalir. Apabila sedang musim hujan maka pintu saluran air akan ditutup, ini mencegah agar sawah tidak kelebihan air dan banjir.

B. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan meliputi kegiatan perawatan, menjaga dan mengamankan saluran. Dengan adanya kegiatan pemeliharaan tersebut maka pelaksanaan kegiatan operasi akan berjalan lancar dan saluran juga akan terjaga kelestariannya. Dalam melakukan perawatan, menjaga dan mengamankan jaringan tersiernya petani di P3A Limau Manis melakukan dalam 3 bentuk kegiatan pemeliharaan yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan darurat dan pemeliharaan berkala.

a. Kegiatan pemeliharaan rutin

Pemeliharaan rutin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara tetap dan teratur. Kegiatan ini dilaksanakan hampir setiap hari pada saat musim menyemai dan musim tanam sedang berlangsung. Kegiatan ini dilakukan secara individual dan swadaya oleh petani yang berada disekitar saluran tersier atau petani yang memanfaatkan saluran tersier tersebut untuk mengairi sawah mereka.

Pada saluran tersier yang ada di hulu, kegiatan pemeliharaan rutin ini dilakukan minimal 3 (tiga) hari sekali, tetapi apabila musim penghujan kegiatan ini bisa berlangsung setiap hari, ini diakibatkan tebalnya endapan lumpur yang menyebabkan terhambatnya saluran. Sedangkan pada saluran yang ada di hilir, kegiatan pemeliharaan ini sedikit lebih berat, kegiatan ini dilakukan harus setiap hari, karena dari keterangan informan kunci dan pengamatan langsung dilapangan apabila perawatan tidak dilakukan setiap hari maka aliran air akan tersumbat karena banyaknya sampah yang menyumbat dan endapan lumpur ditambah lagi dengan pasokan air yang semakin kebawah akan semakin berkurang karena proses penguapan, peresapan dan saluran yang bocor. Bahkan kegiatan pemungutan dan pembuangan sampah ini juga dilakukan pada saluran sekunder yang menuju kesaluran mereka.

Kegiatan pemeliharaan rutin yang biasanya dilakukan adalah:

- a) Pengerukan saluran dari endapan lumpur.
- b) Membabat dan mencabut tanaman dan rumput liar.
- c) Memungut dan membuang sampah-sampah yang menyumbat saluran.

Dalam kegiatan pemeliharaan rutin ini peran P3A hanya sebagai pembimbing karena P3A menyerahkan pelaksanaan pemeliharaan rutin ini kepada petani, khususnya petani yang ada disekitar saluran tersier tersebut.

b. Kegiatan pemeliharaan darurat

Kegiatan pemeliharaan darurat adalah pemeliharaan yang harus mendapatkan perawatan langsung atau secepatnya. Pemeliharaan darurat ini bersifat tiba-tiba, bisa karena bencana alam ataupun perbuatan manusia.

Pemeliharaan ini hanya untuk menangani bagian saluran yang mengalami kerusakan saja.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci kegiatan dilakukan secara swadaya oleh petani dibawah pengawasan pengurus P3A. Bentuk kegiatan pemeliharaan yang dilakukan tergantung bagaimana bentuk kerusakan yang terjadi. Bentuk perawatan darurat yang pernah dilakukan oleh P3A Limau Manis adalah jebolnya saluran akibat hujan yang menyebabkan terbuangnya air dan membanjiri sawah petani, kegiatan yang dilakukan adalah dengan memasang bendungan yang terbuat dari karung berisi pasir yang berguna untuk menghambat aliran air keluar dari saluran.

Untuk kegiatan pemeliharaan darurat ini tidak jarang petani juga melakukannya sampai pada saluran sekunder, jika tidak diatasi segera maka aliran air ke sawah petani menjadi sedikit dan sawah petani akan terancam kekeringan.

Hampir sama dengan pemeliharaan rutin, pada pemeliharaan darurat ini P3A hanya sebagai pembimbing karena pemeliharaan ini bersifat tiba-tiba dan tanpa direncanakan. P3A bertugas mengingatkan agar petani selalu waspada apabila musim penghujan datang, karena pada musim penghujanlah saluran akan sering jebol dan rusak.

c. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang sifatnya jangka panjang. Kegiatan pemeliharaan berkala ini dilakukan untuk mengecek keadaan saluran dan kelayakan saluran, kegiatan ini dilakukan 6 bulan sekali. Pemeliharaan berkala ini dilakukan oleh pengurus P3A yang dibantu oleh juru pengairan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan pemeliharaan ini dilakukan dengan mengecek dan memantau keadaan saluran, apabila terjadi kerusakan maka akan langsung dilakukan perbaikan, tetapi apabila kerusakannya besar dan memakan banyak biaya maka P3A akan meminta bantuan biaya kepada pemerintah dengan jalan membuat semacam proposal yang berisi kegiatan yang dilaksanakan, tujuan kegiatan dan biaya yang diperlukan.

C. Rehabilitasi

Kegiatan rehabilitasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan ke fungsi semula. Kegiatan rehabilitasi hampir sama dengan kegiatan pemeliharaan, bedanya kegiatan ini mempunyai volume yang lebih besar dan membutuhkan dana yang lebih banyak. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki saluran yang mengalami kerusakan.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci, ada 2 (dua) macam proses rehabilitasi yang dilakukan P3A Limau Manis: (1) Rehabilitasi ringan yaitu rehabilitasi yang dilakukan pada saluran yang kerusakannya kecil dan tidak memakan banyak biaya. Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara bergotong royong oleh petani yang ada disekitar saluran yang rusak bersama anggota kelompok tani dan P3A. Dana untuk pelaksanaan rehabilitasi didapat dari sumbangan petani dan kas dari kelompok tani juga P3A. Contoh rehabilitasi ringan yang pernah dilakukan adalah perbaikan pada saluran tersier yang mengalami kebocoran; (2) Rehabilitasi berat, yaitu kegiatan rehabilitasi yang dilakukan untuk memperbaiki saluran yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan biaya besar untuk pelaksanaannya.

Untuk membiayai kegiatan ini, kelompok tani bersama P3A dan dibantu oleh juru pengairan akan meminta bantuan kepada pemerintah. P3A akan membuat semacam proposal yang berisi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran biaya yang dibutuhkan. Salah satu rehabilitasi berat yang pernah dilakukan adalah perbaikan saluran irigasi yang banyak mengalami rusak pada saat gempa 2009 lalu. Dalam melaksanakan proses rehabilitasi diserahkan kepada petani yang bekerja secara bergotong royong.

D. Pengerahan Sumber Daya

a. Pengerahan tenaga (Gotong royong)

Gotong royong kegiatan yang paling diutamakan pada P3A Limau Manis. Dari hasil wawancara dengan informan kunci, karena dengan gotong royonglah semua hal yang berat menjadi ringan. Kesadaran petani untuk bergotong royong di daerah P3A Limau Manis ini masih tinggi. Kegiatan gotong royong biasa dilakukan pada saat perawatan dan rehabilitasi. Untuk

kegiatan rutin dilakukan setiap menjelang musim tanam, kegiatan ini dilakukan oleh semua petani, setiap petani bertanggung jawab atas saluran yang ada disekitar sawah mereka.

Kegiatan gotong royong rutin yang dilakukan di P3A Limau Manis adalah :

- a) Pembabatan rumput dan tumbuhan air. Semua rumput dan tumbuhan air yang tumbuh di saluran maupun disekitar saluran dibersihkan dengan cara dicabut sampai ke akar-akarnya. Sampah hasil pembabatan dibuang jauh dan apabila sudah kering dibakar agar tidak tumbuh lagi.
- b) Pembersihan sampah. Semua sampah yang ada disaluran dibersihkan dengan cara diangkat dan dibuang, kegiatan ini bersamaan dengan pembabatan rumput.
- c) Pencabutan alang-alang dan semak belukar. Alang-alang dan semak belukar yang ada disekitar saluran dicabut hingga ke akar-akarnya, ini bertujuan agar disekitar saluran tetap bersih dan tumbuhan liar tersebut tidak tidak menjalar dan menyumbat saluran.
- d) Pengerukan lumpur pada saluran (pengangkatan sedimen). Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengerukan saluran yang telah dangkal karena diendapi lumpur. Kegiatan ini bertujuan agar jalannya air pada saluran bisa tetap mengalir dengan lancar.

b. Pengerahan materi

Pengerahan materi maksudnya adalah petani berpartisipasi dalam mengelola irigasi dengan menyumbangkan materi, baik dalam rehabilitasi maupun dalam kegiatan yang lainnya, materi yang disumbangkan dapat berupa pasir, semen, batu dan materi lainnya yang dibutuhkan.

c. Pengerahan finansial (Pembayaran Iuran)

Besar iuran wajib anggota P3A untuk petani sawah adalah sebesar Rp 10.000,-/Ha, sedangkan untuk kolam ikan dipungut sebesar Rp 5000,-/panen/unit untuk kolam air deras dan Rp 2000,-/panen/unit untuk kolam air tenang. Iuran wajib ini dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah panen. Tetapi pada pelaksanaannya banyak juga petani sawah maupun

petani kolam yang terlambat untuk membayar iuran wajib tersebut. Menurut hasil wawancara dengan informan kunci ini mungkin disebabkan karena kurang tegas dalam pemberian sanksi.

E. Penanganan Konflik

Dalam setiap kegiatan tidak terlepas dari konflik, konflik adalah masalah yang timbul dan dapat memicu perpecahan. Termasuk juga pada P3A Limau Manis, konflik dapat terjadi karena masalah kecil. Oleh karena itu peran P3A dalam pemecahan dan mengatasi konflik ini sangat diperlukan. Untuk mengatasinya P3A perlu mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik sebelum mencari pemecahan masalahnya.

a. Mengidentifikasi penyebab konflik

Mengidentifikasi penyebab konflik merupakan langkah pertama sebelum mengatasi konflik tersebut. Pada P3A Limau Manis ada 2 konflik yang pernah terjadi, yaitu konflik yang bersifat intern dan ekstern. Konflik intern adalah konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi, baik antara sesama anggota, maupun antara anggota dengan pengurus. Sedangkan konflik ekstern adalah konflik yang terjadi diluar tubuh organisasi.

Konflik intern yang biasa terjadi pada P3A adalah masalah pembagian air. Dari hasil wawancara dengan informan kunci, pada P3A Limau Manis konflik intern ini tidak pernah terjadi. Air yang cukup dalam berusaha tani menyebabkan tidak adanya terjadi permasalahan yang menimbulkan konflik bagi anggota P3A, sedangkan konflik ekstern adalah konflik dengan pihak luar. Ini pernah terjadi pada P3A Limau Manis, yaitu dengan pihak PDAM. Masalah yang terjadi adalah masalah pengambilan air. Penyebab konflik adalah anggota perkumpulan merasa keberatan dengan keberadaan PDAM yang juga memanfaatkan saluran irigasi sebagai sumber air karena sawah-sawah petani bisa kekurangan air.

b. Mengupayakan penyelesaian konflik

Setelah semua hal penyebab konflik telah teridentifikasi maka dicarilah jalan untuk mengatasi konflik. Untuk masalah dengan pihak

PDAM, P3A Limau Manis telah melakukan pembicaraan yaitu dengan jalan musyawarah. Dari hasil musyawarah diputuskan beberapa ketentuan yang telah sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, sampai sekarang permasalahan dengan pihak PDAM tidak pernah terjadi lagi.

Untuk permasalahan-permasalahan kecil seperti beda pendapat dan kesalahpahaman, biasanya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan semua pihak menerima hasil musyawarah tersebut.

4.1.4 . Partisipasi Petani dalam Pengelolaan irigasi

A. Partisipasi Petani dalam Operasi Jaringan Irigasi

Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan petani sampel di Lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori rendah yaitu 23,74%, dengan nilai yang diperoleh 47 dari 198 nilai yang diharapkan. Sedangkan partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori sedang yaitu 64,73%, dengan nilai yang diperoleh 167 dari 258 nilai yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Partisipasi Petani dalam Operasi Jaringan Irigasi

No	Uraian	Jumlah (orang)		Skor	Total		Persentase (%)		Kategori Partisipasi	
		Hulu	Hilir		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Pengaturan air dan pembuangan									
	a. Selalu	1	43	2	19	86	28,79	100	Rendah	Tinggi
	b. Kadang-kadang	17	0	1						
	c. Tidak pernah	15	0	0						
2	Menyusun rencana tata tanam									
	a. Selalu	3	8	2	26	40	39,39	46,51	Sedang	Sedang
	b. Kadang-kadang	20	24	1						
	c. Tidak pernah	10	11	0						
3	Menyusun rencana pembagian air									
	a. Selalu	0	14	2	2	41	3,03	47,67	Rendah	Sedang
	b. Kadang-kadang	2	13	1						
	c. Tidak pernah	31	16	0						
Total		33	43		47	167	23,74	64,73	Rendah	Sedang

B. Partisipasi Petani dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan petani sampel di Lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori sedang yaitu 33,71%, dengan nilai yang diperoleh 89 dari 264 nilai yang diharapkan. partisipasi petani yang berada di hilir juga berada pada kategori sedang yaitu 59,88%, dengan nilai yang diperoleh 206 dari 344 nilai yang diharapkan, dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Partisipasi Petani dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

No	Uraian	Jumlah (orang)		Skor	Total		Persentase (%)		Kategori Partisipasi	
		Hulu	Hilir		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Perencanaan pemeliharaan									
	a. Selalu	2	10	2	21	48	31,81	55,81	Rendah	Sedang
	b. Kadang-kadang	17	28	1						
	c. Tidak pernah	14	5	0						
2	Pemeliharaan rutin									
	a. Selalu	4	39	2	29	82	43,94	95,35	Sedang	Tinggi
	b. Kadang-kadang	21	4	1						
	c. Tidak pernah	5	0	0						
3	Pemeliharaan darurat									
	a. Selalu	2	6	2	21	36	31,81	41,86	Rendah	Sedang
	b. Kadang-kadang	17	25	1						
	c. Tidak pernah	14	13	0						
4	Pemeliharaan berkala									
	a. Selalu	2	6	2	18	40	27,27	46,51	Rendah	Sedang
	b. Kadang-kadang	17	24	1						
	c. Tidak pernah	14	13	0						
Total		33	43		89	206	33,71	59,88	Rendah	Sedang

C. Partisipasi Petani dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Partisipasi petani dalam rehabilitasi irigasi tersier dibagi atas dua item yaitu: Ikut merencanakan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dan Ikut melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan petani sampel di lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori sedang yaitu 41,67%, dengan nilai yang diperoleh 55 dari 132 nilai yang diharapkan. Partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori tinggi yaitu 69,76%, dengan nilai yang diperoleh 120 dari 172 nilai yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Partisipasi Petani dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi

No	Uraian	Jumlah (orang)		Skor	Total		Persentase (%)		Kategori Partisipasi	
		Hulu	Hilir		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Perencanaan rehabilitasi									
	a. Selalu	3	9	2	19	44	28,79	51,16	Rendah	Sedang
	b. Kadang-kadang	13	26	1						
	c. Tidak pernah	17	8	0						
2	pelaksanaan rehabilitasi									
	a.Selalu	7	34	2	36	76	54,55	88,37	Sedang	Tinggi
	b.Kadang-kadang	22	8	1						
	c.Tidak pernah	4	1	0						
Total		33	43		55	120	41,67	69,76	Sedang	Tinggi

D. Partisipasi Petani dalam Pengerahan Sumberdaya

Pengerahan sumberdaya adalah segala sesuatu yang disumbangkan oleh petani dalam pengelolaan irigasi, sumberdaya dapat berupa tenaga, materi maupun finansial.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan petani sampel di lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori rendah yaitu 25,25%, dengan nilai yang diperoleh 50 dari 198 nilai yang diharapkan. Partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori sedang yaitu 39,53%, dengan nilai yang diperoleh 102 dari 256 nilai yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Partisipasi Petani dalam Pengerahan Sumber Daya

No	Uraian	Jumlah (orang)		Skor	Total		Persentase (%)		Kategori Partisipasi	
		Hulu	Hilir		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Pengerahan tenaga									
	a. Selalu	4	33	2						
	b. Kadang-kadang	22	10	1	30	76	45,45	88,37	Sedang	Tinggi
	c. Tidak pernah	7	0	0						
2	Pengerahan materi									
	a. Selalu	0	0	2						
	b. Kadang-kadang	0	0	1	0	0	0	0	Rendah	Rendah
	c. Tidak pernah	33	43	0						
3	Pengerahan finansial									
	a. Selalu	2	5	2						
	b. Kadang-kadang	16	16	1	20	26	30,30	30,23	Rendah	Rendah
	c. Tidak pernah	15	22	0						
Total		33	43		50	102	25,25	39,53	Rendah	Sedang

E. Partisipasi Petani dalam Penanganan Konflik

Konflik yang pernah terjadi dalam pengelolaan irigasi limau manis yaitu kondisi kekurangan air pada musim kemarau, pada musim tersebut, volume air akan berkurang namun kebutuhan akan air tetap, sehingga petani banyak yang mengambil air secara tidak resmi. Maksudnya adalah petani kadang membuka pintu bangunan, padahal belum gilirannya. Partisipasi petani dalam penanganan konflik tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: mengidentifikasi penyebab konflik dan mengupayakan penyelesaian konflik. Hasil penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan petani sampel di lapangan, dapat diketahui bahwa partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori rendah yaitu 25,25%, dengan nilai yang diperoleh 50 dari 198 nilai yang diharapkan. Partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori sedang yaitu 39,53%, dengan nilai yang diperoleh 102 dari 256 nilai yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Partisipasi Petani dalam Penanganan Konflik

No	Uraian	Jumlah (orang)		Skor	Total		Persentase (%)		Kategori Partisipasi	
		Hulu	Hilir		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Mengidentifikasi penyebab konflik									
	a. Selalu	0	34	2	9	77	13,64	89,53	Rendah	Tinggi
	b. Kadang-kadang	9	9	1						
	c. Tidak pernah	24	0	0						
2	Mengupayakan penyelesaian konflik									
	a. Selalu	11	36	2	33	79	50	91,86	Sedang	Tinggi
	b. Kadang-kadang	11	7	1						
	c. Tidak pernah	11	0	0						
Total		33	43		42	156	31,82	90,7	Rendah	Tinggi

Dari semua kegiatan partisipasi dalam pengelolaan DI Limau Manis, diketahui bahwa dalam operasi irigasi, partisipasi petani di hulu berada pada kategori rendah (23,74%) dan petani di hilir berada pada kategori sedang (64,73%), dalam pemeliharaan irigasi partisipasi petani di hulu (33,71%) sama-sama berada pada kategori sedang, dengan partisipasi petani yang berada di hilir (59,08%), dalam rehabilitasi irigasi partisipasi petani di hulu berada pada kategori sedang (41,67%) dan petani di hilir berada pada kategori tinggi (69,76%), dalam pengerahan sumberdaya partisipasi petani di hulu (25,25%) dengan kategori rendah dan partisipasi petani yang berada di hilir (39,39%) dengan kategori sedang, dan dalam penanganan konflik partisipasi petani di hulu (31,82%) berada pada kategori rendah dan partisipasi petani yang berada di hilir (90,7%) berada pada kategori tinggi. Sehingga secara keseluruhan partisipasi petani di hulu dalam pengelolaan irigasi berada pada kategori rendah (30,63%) dan petani hilir berada pada kategori sedang (62,04%). Namun bila dilihat secara keseluruhan, partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi Limau Manis, dengan mengambil sampel petani hulu dan petani hilir, maka partisipasi petani berada pada kategori sedang (48,40%) dengan total nilai diperoleh 1030 dari 2128 nilai yang diharapkan. Dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Partisipasi Petani dalam Pengelolaan DI Limau Manis

No	Uraian	Total yang diperoleh		Nilai yang diharapkan		Persentase (%)		Kategori	
		Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Operasi	47	167	198	258	23,74	64,73	Rendah	Sedang
2	Pemeliharaan	89	206	264	344	33,71	59,08	Sedang	Sedang
3	Rehabilitasi	55	120	132	172	41,67	69,76	Sedang	Tinggi
4	Pengeralahan sumberdaya	50	102	198	258	25,25	39,53	Rendah	Sedang
5	Penanganan konflik	42	156	132	172	31,82	90,7	Rendah	Tinggi
Total		283	747	924	1204	30,63	62,04	Rendah	Sedang
		1030		2128		48,40		Sedang	

4.1.5 Motivasi Petani Berpartisipasi dalam Pengelolaan Irigasi

Motivasi adalah suatu dorongan yang mempengaruhi petani berpartisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier. Menurut Indrawati (2003) motivasi petani dalam pengelolaan irigasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi meliputi pendidikan petani baik formal maupun non formal dan pendapatan perbulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat apa pengaruh faktor internal terhadap partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi tersier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pengaruh faktor internal terhadap partisipasi petani

No	Uraian	Jumlah (orang)	Total skor yang diharapkan	Total Skor	Persentase (%)	Kategori partisipasi
1	Pendidikan formal					
	a. SD	43	1204 (43x28)	471	39,12	Sedang
	b. SLTP	11	308(11x28)	163	52,92	Sedang
	c. SLTA	19	532(19x28)	335	62,97	Sedang
	d. PT	3	84(3x28)	61	72,62	Tinggi
2	Pendidikan non formal					
	a. Ada	16	448 (16x28)	285	63,62	Sedang
	b. Tidak ada	60	1680(60x28)	745	44,35	Sedang
3	Pendapatan perbulan					
	a. <500.000	17	476(17x28)	194	40,76	Sedang
	b. 500.000-1.000.000	44	1232(44x28)	570	46,27	Sedang
	c. >1.000.000	15	420(15x28)	266	63,33	Sedang

B. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi meliputi luas lahan, jarak antara saluran irigasi dan lahan, serta letak lahan dalam irigasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat apa pengaruh faktor eksternal terhadap partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi tersier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Partisipasi Petani

No	Uraian	Jumlah (orang)	Total skor yang diharapkan	Total skor yang diperoleh	Persentase (%)	Kategori partisipasi
1	Luas lahan (Ha)					
	a. < 0,5	21	588(21x28)	180	30,61	Rendah
	b. 0,5 – 1	55	1540(55x28)	850	55,19	Sedang
2	Jarak antara saluran dan lahan (M)					
	a. <25	33	924(33x28)	283	30,63	Rendah
	b. 25-50	17	476(17x28)	277	58,19	Sedang
	c. >50	26	728(26x28)	420	57,69	Sedang
3	Letak lahan					
	a. Hulu	33	924(33x28)	283	30,63	Rendah
	b. Hilir	43	1204(43x28)	747	62,04	Sedang

4.2 Pembahasan

4.2.1 Tingkat Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis

Pengelolaan irigasi partisipatif merupakan salah satu Reformasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang mempunyai prinsip utama yaitu pengelolaan irigasi yang melibatkan seluruh stakeholder (Pemerintah, petani, LSM dan lainnya) mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dengan tujuan akhir untuk mengoptimalkan penggunaan air irigasi, sehingga dapat meningkatkan suatu hasil usahatani.

Reformasi tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi yang di dalamnya dengan jelas ditegaskan bahwa pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air. Sebagai tindak lanjutnya peranan Perkumpulan

Petani Pemakai Air perlu dikedepankan melalui kegiatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif.

Partisipasi dalam pengelolaan irigasi tersier adalah keterlibatan masyarakat sebagai anggota P3A dalam hal operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, distribusi, pengalokasian sumberdaya dan penanganan konflik.

A. Partisipasi Petani dalam Operasi Jaringan Irigasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai partisipasi petani dalam operasi jaringan irigasi, partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori rendah sedangkan partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori sedang.

Perbedaan tingkatan partisipasi antara petani yang berada di hulu dan di hilir terjadi karena petani yang di hulu selalu mendapatkan air dengan cukup setiap waktu jika dibandingkan petani yang berada di hilir sehingga petani yang berada di hulu menganggap bahwa pengaturan dan pembuangan air itu dirasa tidak begitu penting dilakukan karena dilakukan atau tidak, kebutuhan air akan selalu tercukupi. Berbeda dengan petani yang berada di hilir, bagi mereka pengaturan dan pembuangan air itu penting, karena jika tidak dilakukan maka kebutuhan air kadang tidak mencukupi.

Dalam menyusun rencana tata tanam persentase partisipasi petani yang berada di hilir lebih tinggi dari petani yang berada di hulu. Tingginya persentase ini karena menurut petani yang berada di hilir, jika rencana tata tanam tidak disusun, maka takutnya nanti pas membutuhkan air banyak volumenya tidak mencukupi, pas kebutuhan air sedikit malahan volume air tinggi. Namun menurut petani yang berada di hulu, penyusunan ini memang penting. Hal ini dikarenakan petani hanya mengikuti apa yang telah disusun saja dan tidak ikut melakukan penyusunan.

Dalam menyusun rencana pembagian partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori rendah dan partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori sedang. Masih rendahnya kesadaran petani dalam menyusun rencana pembagian air diakibatkan karena petani belum menyadari akan pentingnya kegiatan ini, padahal jika rencana pembagian air tidak dilakukan maka

air yang diperoleh tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, apalagi bagi petani yang berada di hilir. Namun dalam penelitian ini petani yang berada di hilir lebih banyak berpartisipasi dibandingkan petani yang berada di hulu.

B. Partisipasi Petani dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai partisipasi petani dalam pemeliharaan jaringan irigasi, secara keseluruhan diketahui bahwa partisipasi petani yang berada di hulu dan partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori sedang.

Dalam menyusun rencana pemeliharaan, partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori rendah, sedangkan yang berada di hilir berada pada kategori sedang. Terjadinya perbedaan partisipasi antara petani di hulu dan di hilir terjadi karena petani yang di hulu menganggap kalau semua itu hanya tugas pengurus P3A saja, dan petani hanya mengikuti apa yang telah diputuskan, padahal pembangunan yang partisipatif tidak lah demikian, suatu pembangunan partisipatif memang menuntut partisipasi petani dimulai dari perencanaan.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin, partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori sedang, sedangkan petani yang berada di hilir berada pada kategori tinggi. Ini terjadi karena jaringan irigasi tersier bagian hulu airnya selalu lancar, walaupun saluran air di penuh tumbuhan rumput, berbeda dengan saluran yang berada di hilir, yang mudah tersumbat jika tidak dibersihkan dengan baik, maka oleh sebab itu petani yang di hilir harus banyak berpartisipasi dalam pemeliharaan irigasi secara rutin.

Dalam pemeliharaan darurat seperti kerusakan karena saluran jebol, maka petani melakukan pemeliharaan dengan cara membuat bendungan dari karung yang berisi pasir atau tanah, sehingga air dapat mengalir lagi dengan normal. Dalam kegiatan ini berdasarkan penelitian di lapangan, partisipasi petani yang berada di hulu masih rendah, karena saluran jebol biasanya terjadi di bagian tengah atau hilir, jadi air untuk petani yang berada di hulu tidak akan terganggu, maka yang banyak berpartisipasi hanyalah petani yang berada di hilir.

Dalam pemeliharaan berkala yang dilaksanakan sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun yang didampingi oleh instansi terkait seperti Dinas

Pekerjaan umum, partisipasi petani yang di hulu berada pada kategori rendah dan di hilir berada pada kategori sedang. Ini terjadi karena, petani yang berada di hulu sibuk dengan rutinitasnya sehingga tidak bisa melakukan pemeliharaan ini, selain itu penyebaran informasi tentang pemeliharaan berkala juga masih kurang.

C. Partisipasi Petani dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Partisipasi petani dalam rehabilitasi jaringan irigasi meliputi penyusunan rencana rehabilitasi dan ikut melaksanakan kegiatan rehabilitasi dalam perencanaan rehabilitasi partisipasi petani yang berada di hulu masih berada pada kategori rendah, karena sebagian besar petani yang di hulu menganggap kegiatan ini tidak penting dilakukan karena, kegiatan rehabilitasi irigasi adalah tugas pemerintah, dan jaringan irigasipun jarang yang rusak, air mengalir dengan lancar. Namun bagi petani yang berada di hilir, perencanaan rehabilitasi penting dilakukan karena, jika rehabilitasi tidak direncanakan, maka rehabilitasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, partisipasi petani yang berada di hulu berada pada kategori sedang dan petani yang berada di hilir berada pada kategori tinggi. Tingginya partisipasi petani yang berada di hilir, karena petani di hilir selalu mengikuti kegiatan rehabilitasi, menurut petani yang berada di hilir, jika kegiatan ini tidak melibatkan masyarakat, maka nantinya rehabilitasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Petani yang berada di hulu hanya sebagian kecil saja yang mengikuti.

D. Partisipasi Petani dalam Pengerahan Sumber Daya

Partisipasi petani dalam pengerahan sumber daya dapat berupa tenaga materi dan finansial. Dalam pengerahan tenaga partisipasi petani yang berada di hilir berada pada kategori tinggi karena sebagian besar petani selalu ikut gotong royong dalam pemeliharaan dan rehabilitasi. Dalam pengerahan materi, baik petani yang berada di hulu maupun petani yang berada di hilir berada pada kategori rendah, karena selama 2 tahun terakhir, petani memang tidak pernah menyumbangkan materi dalam pengelolaan irigasi. Sedangkan dalam pengerahan

finansial, partisipasi petani juga masih berada pada kategori rendah, karena hanya sebagian kecil saja petani yang melakukan pengalihan finansial.

E. Partisipasi Petani dalam Penanganan Konflik

Partisipasi petani dalam penanganan konflik meliputi partisipasi petani dalam mengidentifikasi penyebab konflik dan partisipasi petani dalam penyelesaian konflik. Partisipasi petani yang di hulu dalam mengidentifikasi penyebab konflik berada pada kategori rendah dan petani yang berada di hilir berada pada kategori tinggi, hal ini terjadi karena adanya keinginan petani untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan mengurangi perselisihan antar petani.

Rendahnya partisipasi petani di hulu dalam penanganan konflik, karena konflik di hulu jarang terjadi, karena air yang dibutuhkan selalu ada, sehingga konflik air tidak terjadi. Berbeda dengan petani yang berada di hilir, konflik sering terjadi jika musim kemarau tiba, karena ketersediaan air kurang namun kebutuhan banyak. Namun konflik tersebut bisa diatasi melalui musyawarah menuju mufakat.

4.2.2 Motivasi dalam Pengelolaan Irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis

Motivasi berasal dari kata “motif” yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman, 2005).

Menurut Purwanto (2002), motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi motivasi tersebut, pada dasarnya mengandung arti/maksud yang sama yaitu bahwa motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan guna mencapai suatu tujuan. Yang dimaksud motivasi dalam penelitian ini adalah motivasi petani dalam pengelolaan irigasi, yaitu suatu dorongan atau kemauan seseorang untuk melakukan pengelolaan irigasi.

Motivasi mempunyai tiga komponen utama yaitu kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang mereka miliki dengan apa yang mereka harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Dorongan yang berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti dari pada motivasi (Dimiyati. DKK, 2005:88).

A. Faktor Internal

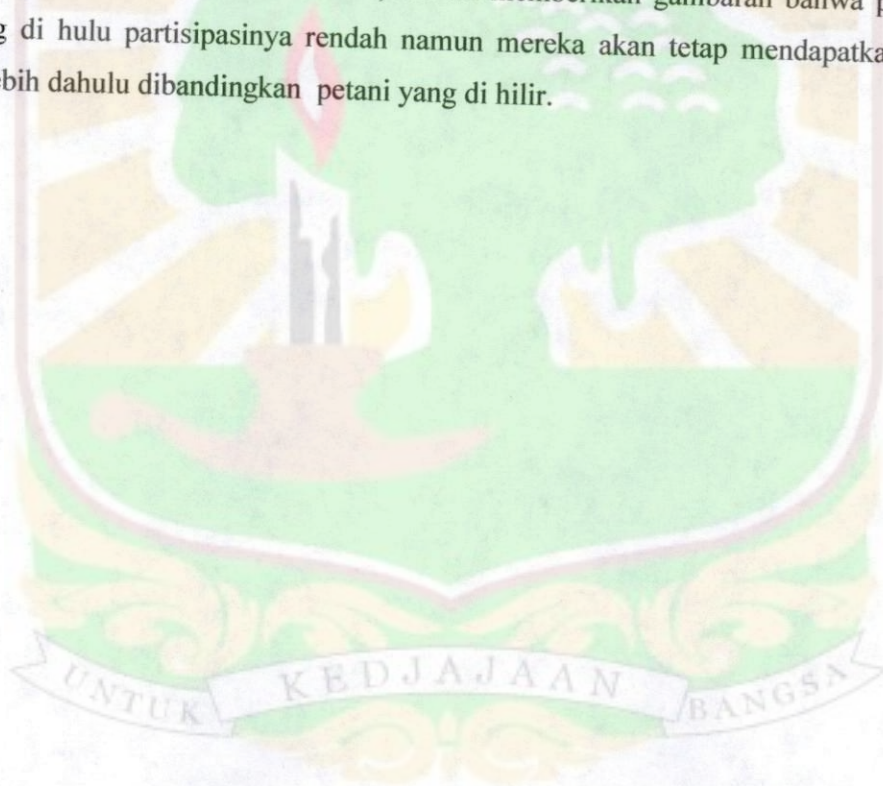
Faktor internal yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendapatan perbulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pendidikan formal mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka partisipasinya akan semakin tinggi. Begitu juga dengan pendidikan non formal, jika seseorang mengikuti pendidikan non formal, maka partisipasinya akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mengikuti pendidikan non formal ini sesuai dengan pendapat Litwin (1986) dalam Suciati (2007) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap partisipasi karena semakin tinggi latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang, semakin luas pula pengetahuannya tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang diberikan.

Pendapatan perbulan mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, hasil penelitian di lapangan menunjukkan, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka partisipasinya akan semakin tinggi pula. Hal ini membuktikan pendapat Gustina (2001) yang menyatakan Faktor pendidikan dan pendapatan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketaatan seseorang dalam mengelola usahatannya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik diharapkan masyarakat akan lebih taat dalam mengikuti kegiatan dalam suatu perkumpulan. Tingkat pendidikan nampak pada kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul dan bagaimana masyarakat dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi petani meliputi luas lahan, jarak antara saluran dan lahan serta letak lahan dalam Daerah Irigasi . Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semakin luas lahan yang dimiliki petani, maka partisipasinya dalam pengelolaan irigasi akan semakin tinggi pula.

Jarak antara saluran dan lahan mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa semakin jauh jarak saluran dan lahan, maka persentase partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi akan tinggi pula. Letak lahan juga mempengaruhi persentase partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi, berdasarkan hasil penelitian, petani yang letaknya di hilir, partisipasinya lebih tinggi dari petani yang berada di hulu, ini menggambarkan bahwa petani yang di hilir lebih banyak berpartisipasi dibandingkan yang berada di hulu, hal ini memberikan gambaran bahwa petani yang di hulu partisipasinya rendah namun mereka akan tetap mendapatkan air terlebih dahulu dibandingkan petani yang di hilir.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian yang telah dicapai, dapat ditarik kesimpulan mengenai tingkat partisipasi dan motivasi petani dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Kelurahan Limau Manis

1. Partisipasi petani dalam pengelolaan irigasi di Daerah Irigasi Limau Manis secara keseluruhan berada pada kategori sedang, namun bila dilihat antara partisipasi petani yang berada di hulu dan di hilir, partisipasi petani yang berada di hilir lebih tinggi dibandingkan petani yang berada di hulu.
2. Motivasi petani dalam pengelolaan irigasi dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan perbulan, luas lahan, jarak antara saluran dan lahan serta letak lahan dalam saluran irigasi. Apabila pendidikan petani lebih tinggi, pendapatan lebih tinggi, lahan petani lebih luas, jarak antara saluran dan lahan lebih jauh dan petani berada di hilir maka partisipasinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang pendidikannya lebih rendah, pendapatan lebih rendah, jarak antara saluran dan lahan lebih dekat dan lokasi lahan petani berada di hulu.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada seluruh petani agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan irigasi sehingga manfaat irigasi dapat dirasakan secara maksimal
2. Diharapkan agar motivasi petani dalam pengelolaan irigasi dapat meningkat sehingga irigasi dapat dikelola dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R.1969. *A Ladder Of Citizen Participation*. *Journal Of The American Institute Of Planners* .35 (4): 216-224.
- Badan Pusat Statistik Sumbar, 2008. Padang.
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.2005. *Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Prinsip Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PPIP)*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan Dan Kehutanan, 2009. *Laporan kemajauan pelaksanaan kegiatan Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP)*. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani. Padang
- Hadi, Agus P. 2008 *Rekayasa Kelembagaan Dan Komunikasi Untuk Mengembangkan Partisipasi Petani Dalam Investasi Infrastruktur Pertanian*. Universitas Mataram.
- Hasan, M., 2005. *Bangun Irigasi Dukung Ketahanan Pangan*. Majalah Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Helmi .1992. *Persepektif Sositoteknik dalam Pembangunan Irigasi Kecil*. Visi irigasi No.6 hal 13-23 PSI Unand.Padang.
- Henuk, Yusuf Leonardo.2008.*Komunikasi Pertanianpertanian Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan*.Universitas Nusa Cendana. Kupang.
- Hidayat,Rian 2003. *Pola Hubungan Kerjasama antar Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemerintah*. Fakultas Pertanian Unand. Padang.
- Idola, Putra. 2008. *Analisis Tingkat Partisipasi Petani dalam Penyelenggaraan Program Kompensasi Pengurangan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Bidang Infra Sturuktur*. Fakultas Pertanian Unand. Padang.
- Indrawati Dewi R, Evi Irawan, Nana Haryanti, dan Dody Yuliantoro. 2003 *Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah (RLKT)*. Jurnal Pengelolaan DAS Surakarta.
- Junanto, Deny.2002. *Model Pendekatan Ekosistem Dalam Pembangunan Masyarakat Daerah*.LP3S.Bogor.
- Kartasapoetra, MS. Mul, 1990, *Teknologi Pengairan Pertanian Irigasi Bumi Aksara*. Jakarta.

- Kurnia G dan R. Judawianta 2000. "*Kemandirian perkumpulan petani pemakai air. Prosiding lokakarya kebijaksanaan pengairan mendukung pengembangan agribisnis*". Pusat studi pembangiunan IPB, bogor hal 14-16
- Maksum, Irwan R 2006. *Desentralisasi Dalam Pengelolaan Air Irigasi Tersier (Suatu Studi Dengan Kerangka Konsep Desentralisasi Teritorial Dan Fungsional Di Kabupaten Dan Kota Tegal, Jawa Tengah, Di Kabupaten Jembrana, Bali, Dan Di Hulu Langat, Selangor, Malaysia)* Makara, Sosial Humaniora. Malaysia
- Martius, Endry. 1992. *Pengeralahan Sumber Daya untuk Irigasi Kecil di Sumbar*. Visi Irigasi no.6. Hal 43-53 PSI.Unand. Padang.
- Martius, Endry. 1997. *Penyesuaian Peran Birokrasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Petani*. Visi Irigasi No.13 Hal 12-32 PSI Unand. Padang
- Martius, Endry; Osmet; Febriamansyah, Rudi. 1997 *Sustainabilitas Irigasi dan Prognose Organisasi Petani: Evaluasi Irigasi-Irigasi PIK di Sumatera Barat*, laporan penelitian. Kerja sama PSI Unand dengan Ford Fondation, Padang.
- Nasution ,Devi Handayani. 2005. *Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Ditingkat Tersier Oleh P3A Batipuh Panjang D.I Koto Tuo Kanan, Kecamatanm Koto Tangah Kota Padang* (skripsi). Fakultas Pertanian Universitas Andalas.Padang.
- Nazir, M.2005. "*Metode Penelitian*". Ghalia Indonesia. Bogor.
- Partowijoto, Achmadi.2004. *Makna Partisipasi Dalam Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Air & System Irigasi* .PU-SDA.Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33 /Prt/M/2007 Tentang *Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A*.Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30 /Prt/M/2007 tentang *Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif*.Jakarta.
- Peraturan Mentri pekerjaan Umum Nomor : 32 prt/m/2007 *Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang *Irigasi*. Jakarta.
- Perdana, R,Herlambang.2002. *Gagal Panen Dan Buruknya Saluran Irigasi Teknis*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0207/30/jatim/gaga35.htm> (29 oktober 2009)
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*.Sebelas Maret University Press. Surakarta.

Suciati et.al. 2007. "*Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana UmumTata Ruang Kota Pati*". Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang :MPWK Undip.Semarang.

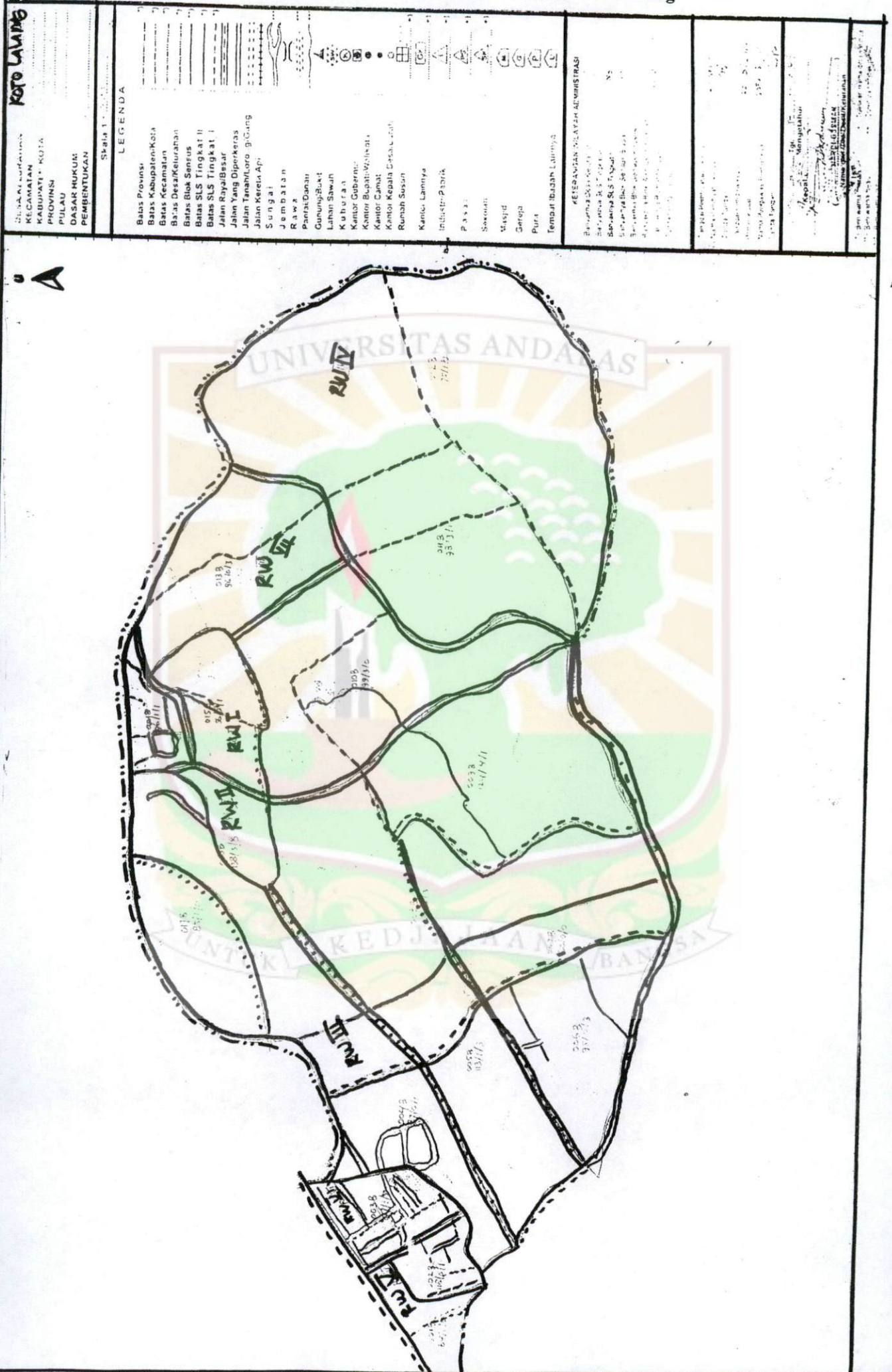
Sudjarwo. 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*. CV. Mandar Maju Bandar Lampung 106 hal.Lampung.

Susanto, Sahid.1998. "*Keberlanjutan Asset Lahan Sawah Beririgasi*" Visi Irigasi. No. 15 Hal 47-69 PSI-SDALP Unand. Padang.

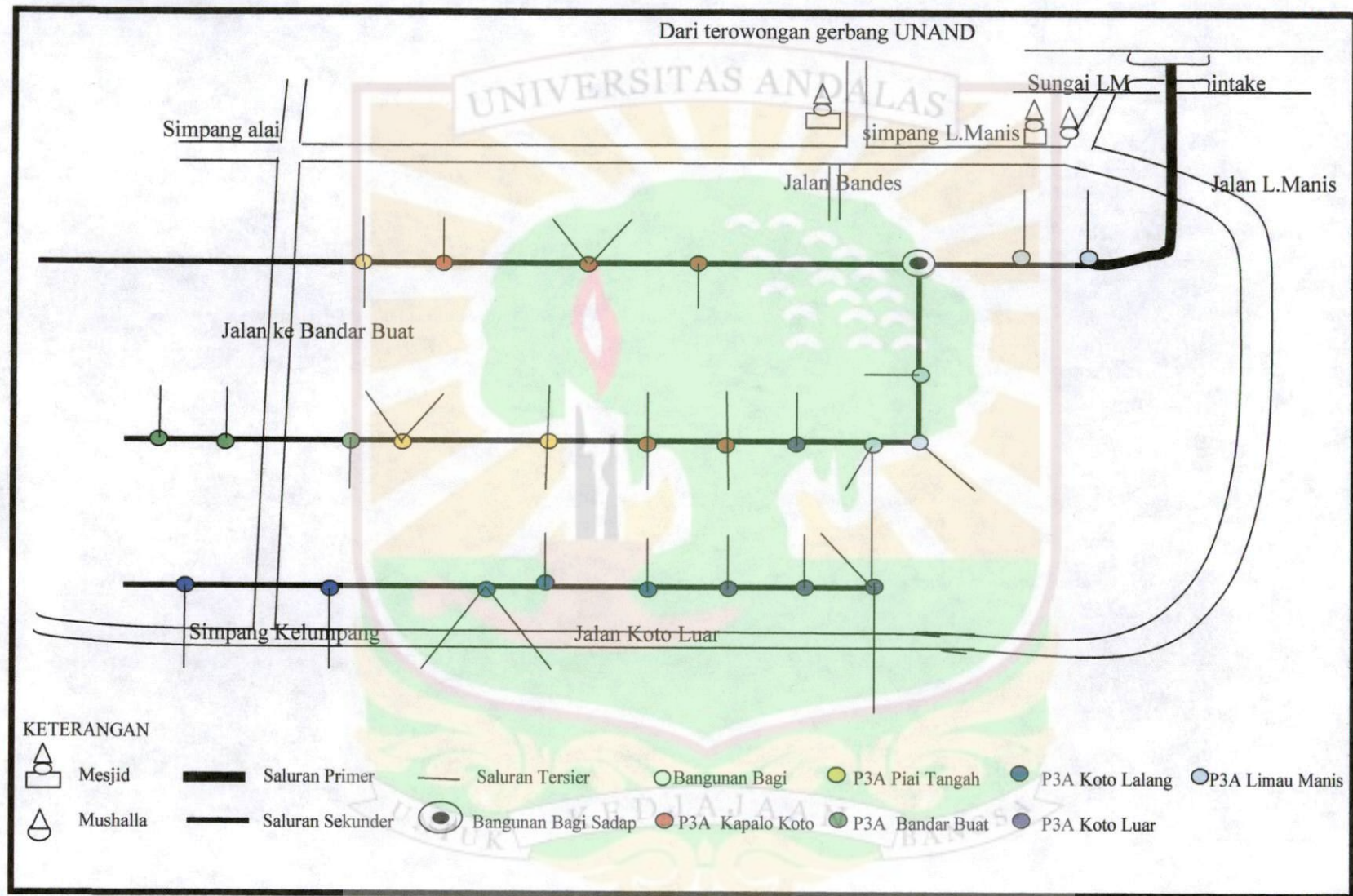


Lampiran 1. Peta Kota Padang Provinsi Sumatera Barat



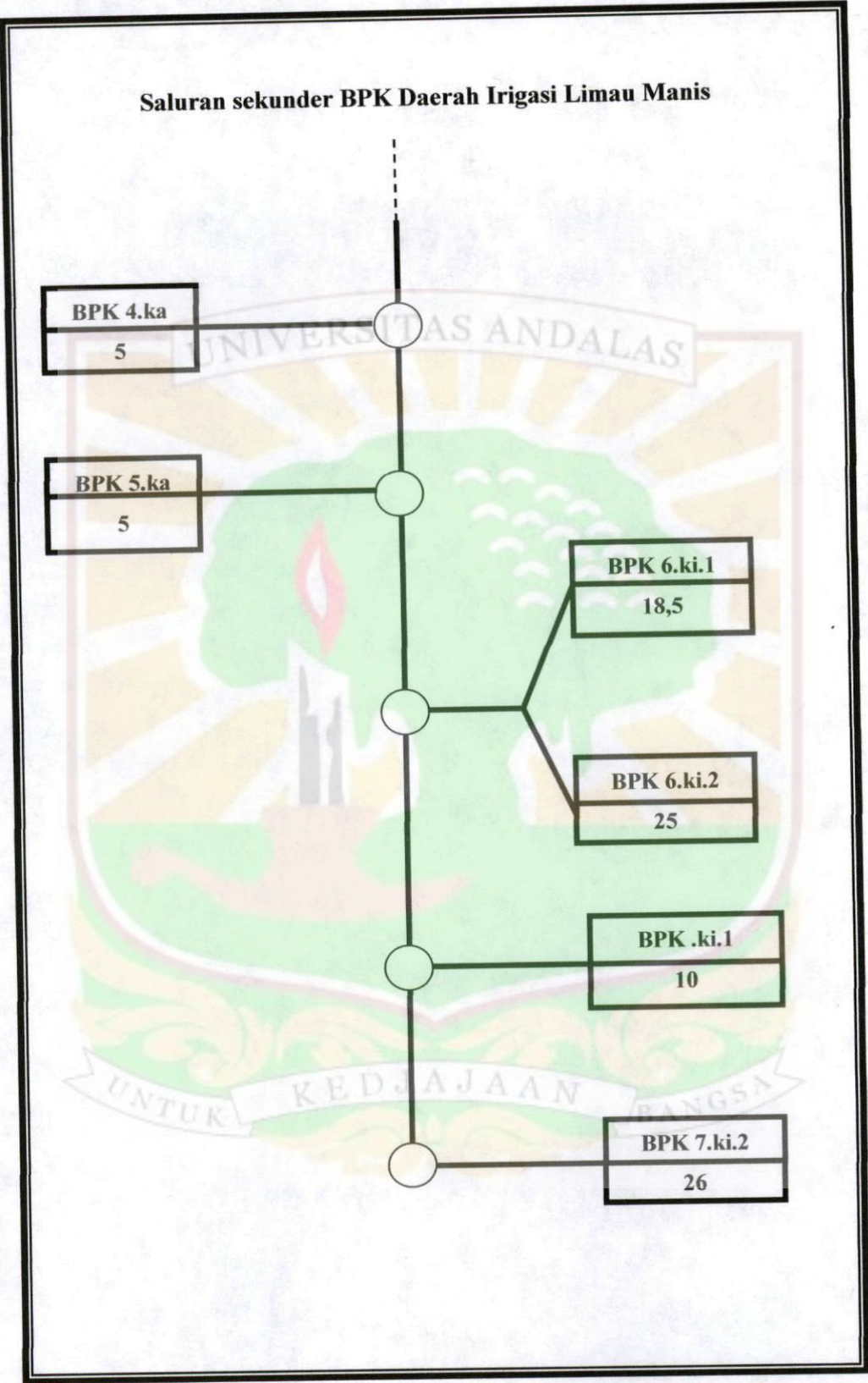


Lampiran 3. Gambar Daerah Irigasi Limau Manis

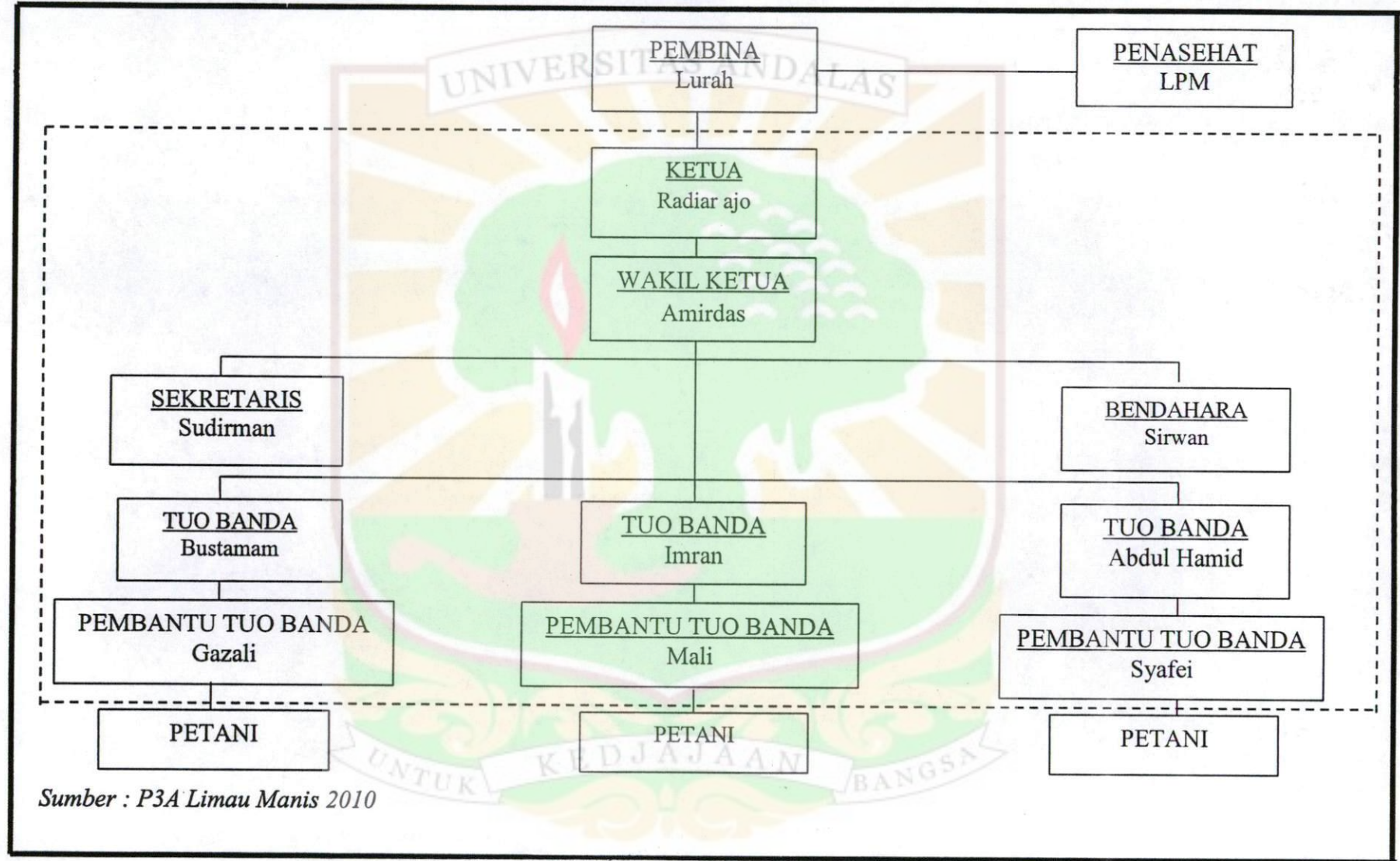




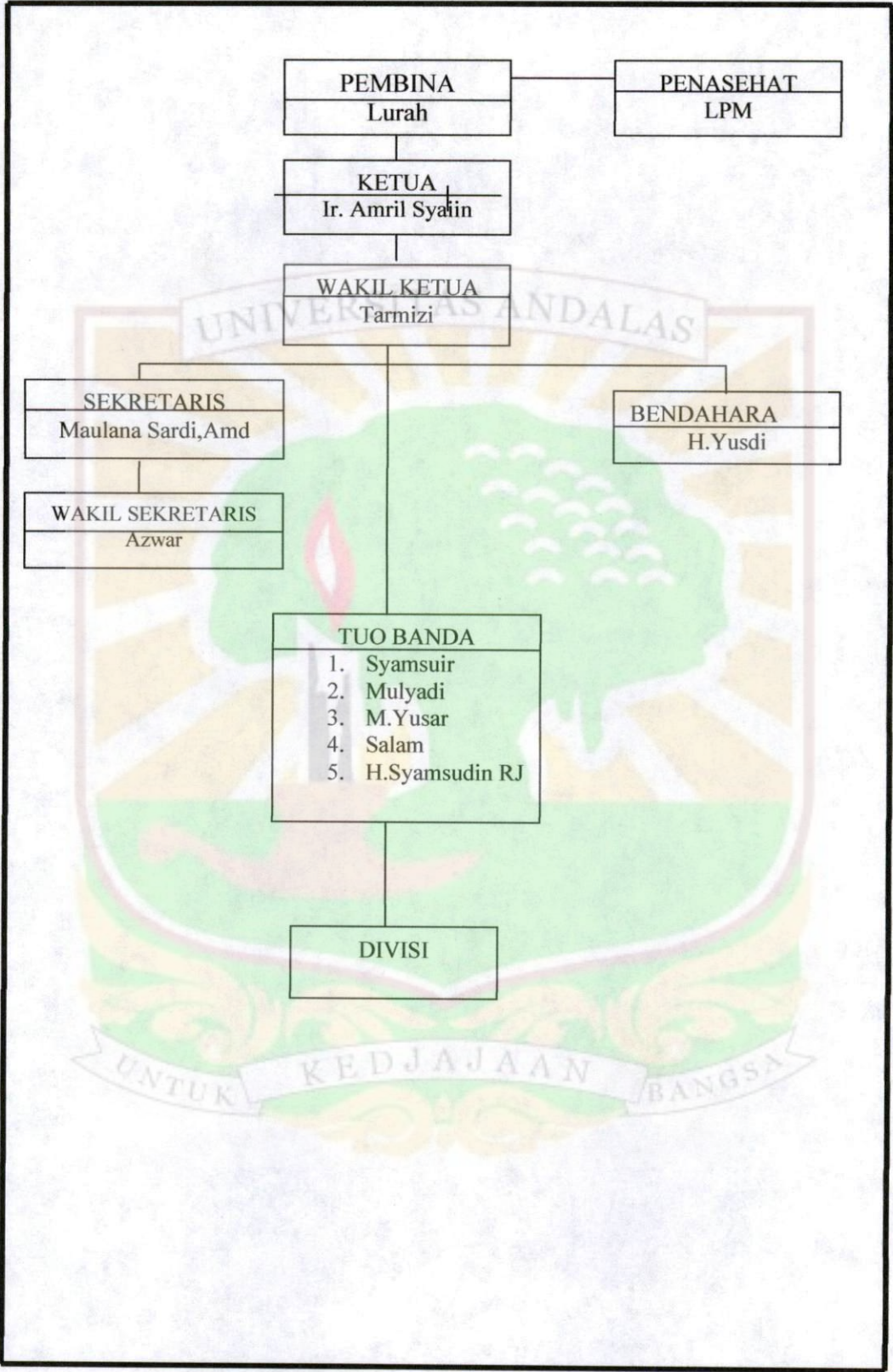
Lampiran 5. Skema jaringan irigasi hilir



Lampiran 6. Struktur Organisasi P3A Limau Manis



Lampiran 7. Struktur Organisasi P3A Kola Jaya (Koto Lalang)



Lampiran 8. Distribusi Tingkat Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Irigasi

No.Resp	Pdf	Pnf	Pdpt (Jt)	Li(Ha)	Jrk (M)	Ltk	Operasi			Pemeliharaan				Rehabilitasi		Pengerahan sumber daya			Penanganan konflik	
							P&p air	Mrttm	Mrpa	Rp	Pr	Pd	Pb	Rr	Mr	Pt	Pm	Pf	Ipk	Mgpk
1	SD	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	0	2
2	SD	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	0	2
3	SD	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	2
4	SD	V	<0,5	<0,5	<25	Hulu	2	2	1	2	1	0	2	1	1	1	0	1	0	2
5	SD	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	0	1	0	2	2	2	1	0	1	0	2
6	SD	-	1	1	<25	Hulu	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	2
7	SD	-	<0,5	1	<25	Hulu	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	0	1	1	2
8	SMP	-	1	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	2
9	SD	-	<0,5	1	<25	Hulu	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
10	SD	-	1	1	<25	Hulu	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	2	0	1
11	SD	-	1	1	<25	Hulu	1	1	0	0	1	1	1	0	1	2	0	1	0	1
12	SD	-	1	1	<25	Hulu	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
13	SD	-	>1	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1
14	SMP	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	1	2	1	0	0	2	2	0	0	1	1
15	SD	-	<0,5	1	<25	Hulu	0	1	0	0	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1
16	SD	-	1	1	<25	Hulu	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
17	SD	-	1	1	<25	Hulu	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	0	0
18	SD	-	1	<0,5	<25	Hulu	0	0	0	1	1	1	0	1	2	1	0	1	0	0
19	SMP	-	1	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
20	SD	-	>1	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
21	PT	V	>1	<0,5	<25	Hulu	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	SD	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
23	SD	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
24	SD	-	0,5-1	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	2
25	SD	-	0,5-1	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
26	SD	-	1	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
27	SD	-	0,5-1	<0,5	<25	Hulu	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2
28	SLTA	-	<0,5	<0,5	<25	Hulu	1	2	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
29	SD	-	0,5-1	<0,5	<25	Hulu	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
30	SD	-	0,5-1	<0,5	<25	Hulu	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0

31	SD	-	0,5-1	<0,5	<25	Hulu	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	0	1	0
32	SD	-	0,5	<0,5	<25	Hulu	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0
33	SD	-	0,5	<0,5	<25	Hulu	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2
34	SMP	V	>1	0,5	100	Hilir	2	0	1	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2
35	SMA	V	0,5	0,5	50	Hilir	2	0	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	2
36	PT	V	>1	1	100	Hilir	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2
37	SMA	V	>1	0,5	100	Hilir	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2	0	1	2	2
38	SMA	V	1	0,5	50	Hilir	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	1	2
39	SMA	V	1	0,5	100	Hilir	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	0	1	1	2
40	SMP	-	1	0,5	100	Hilir	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0	2	1	1
41	SMA	-	>1	0,5	50	Hilir	2	1	1	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1
42	SMA	-	1	0,5	50	Hilir	2	2	1	0	1	2	0	0	1	1	0	2	1	2
43	SMA	-	>1	1	100	Hilir	2	1	0	1	2	0	2	2	2	1	0	1	1	2
44	SMA	V	>1	0,5	100	Hilir	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	0	1	1	2
45	PT	V	>1	0,5	100	Hilir	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2
46	SMA	V	1	0,5	50	Hilir	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	0	1	1	1
47	SMP	-	0,5	0,5	50	Hilir	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	0	1	2	2
48	SD	-	0,5	0,5	100	Hilir	2	1	0	0	2	0	0	0	2	2	0	1	2	1
49	SMP	-	1	0,5	100	Hilir	2	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	2	1
50	SD	-	<0,5	<0,5	50	Hilir	2	1	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	2	1
51	SMA	-	1	0,5	100	Hilir	2	1	2	1	2	0	1	1	2	2	0	0	2	1
52	SD	-	<0,5	0,5	50	Hilir	2	1	2	1	2	0	2	1	2	2	0	0	2	2
53	SD	-	<0,5	1	100	Hilir	2	1	2	1	2	0	2	1	2	2	0	0	2	2
54	SMA	-	<0,5	0,5	100	Hilir	2	1	2	1	2	1	0	1	2	2	0	0	2	2
55	SMA	-	1	0,5	100	Hilir	2	1	2	1	2	1	0	2	2	2	0	0	2	2
56	SMP	-	1	1	100	Hilir	2	1	2	1	2	1	0	1	2	2	0	1	2	2
57	SMP	-	1	1	100	Hilir	2	1	0	1	2	1	0	1	2	2	0	0	2	2
58	SMP	-	1	1	100	Hilir	2	0	0	1	2	1	2	1	2	1	0	0	2	2
59	SMP	-	1	0,5	100	Hilir	2	1	0	1	2	0	2	0	2	2	0	0	2	2
60	SMA	V	>1	0,5	100	Hilir	2	1	0	1	2	1	1	1	2	2	0	0	2	2
61	SMA	-	>1	1	100	Hilir	2	0	2	2	2	1	1	1	2	2	0	0	2	2
62	SMA	-	>1	1	150	Hilir	2	0	2	1	2	1	1	1	2	2	0	1	2	2
63	SMA	-	>1	1	150	Hilir	2	0	2	1	2	1	0	1	2	2	0	1	2	2
64	SMA	-	>1	1	100	Hilir	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	0	1	2	2
65	SD	-	<0,5	1	50	Hilir	2	1	2	2	2	1	1	1	2	1	0	1	2	2

66	SD	-	0,5-1	1	150	Hilir	2	0	2	1	2	1	1	1	2	2	0	1	2	2
67	SD	-	0,5-1	1	200	Hilir	2	0	0	0	2	0	2	1	2	2	0	0	2	2
68	SD	V	0,5-1	1	100	Hilir	2	0	0	1	2	1	0	1	2	2	0	0	2	2
69	SD	-	0,5-1	1	50	Hilir	2	0	0	1	2	0	0	1	2	2	0	1	2	2
70	SD	-	0,5	1	50	Hilir	2	0	0	1	2	0	0	0	2	2	0	0	2	2
71	SD	-	1	0,5	50	Hilir	2	1	0	1	2	1	0	1	2	2	0	0	2	2
72	SD	-	0,5-1	0,5	50	Hilir	2	1	0	1	2	1	0	1	2	2	0	0	2	2
73	SD	-	0,5-1	0,5	50	Hilir	2	1	0	1	2	1	1	1	2	2	0	2	2	2
74	SD	-	0,5-1	0,5	50	Hilir	2	2	0	1	2	0	1	0	2	2	0	0	2	2
75	SD	-	0,5-1	0,5	50	Hilir	2	2	0	1	2	0	1	0	2	2	0	0	2	2
76	SMA	-	0,5	0,5	50	Hilir	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	0	0	2	2

Keterangan:

No.Resp= Nomor Urut Responden Penelitian

Pdf = Pendidikan formal

Pnf = Pendidikan non formal

Pdpt = Pendapatan perbulan

Ll = Luas lahan yang dimiliki

Jrk = Jarak antara saluran dan lahan

Ltk = Letak lahan dalam saluran irigasi

P&P = Pengaturan dan pembuangan air

Mrttm = Menyusun rencana tata tanam

Mrpa = Menyusun rencana pembagian air

Rp = Menyusun rencana pemeliharaan

Pr = Ikut pemeliharaan darurat

Pd = Ikut pemeliharaan darurat

Pb = Ikut pemeliharaan berkala

Rr = Menyusun rencana rehabilitasi

Mr = Melaksanakan kegiatan rehabilitasi

Pt = Pengerahan tenaga

Pm = Pengerahan materi

Pf = Pengerahan finansial

Ipk = Identifikasi penyebab konflik

Mgpk = Mengupayakan penyelesaian konflik